



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

2022
#KKP
ACCELERATE



KATA PENGANTAR



bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2022 disusun sebagai amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP. Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PSDKP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di lingkungan kementerian Kelautan dan Perikanan dan Rencana Strategis Ditjen PSDKP Tahun 2020-2024.

Kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) sepanjang tahun 2022 telah menunjukkan keberhasilan dalam pencapaian kinerjanya, dibuktikan dengan pencapaian seluruh indikator kinerja sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022 dengan nilai sebesar 103,89%, dengan kategori **"berhasil"**. Capaian kinerja tersebut selaras dengan realisasi anggaran sebesar 99,81%, sehingga Ditjen PSDKP mampu melakukan efisiensi sebesar 6,45. Untuk itu kami memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas pencapaian tersebut, yang merupakan hasil kerja seluruh pegawai Ditjen. PSDKP.

Pada akhirnya kami mengajak kepada seluruh jajaran Ditjen PSDKP, bahwa tantangan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2023 semakin besar, kita harus secara bersama-sama mengawal seluruh kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan terutama implementasi 5 (lima) kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan berbasis ekonomi biru. Semoga kinerja pengawasan SDKP kedepan terus meningkat, dengan semangat **PILAR Ditjen. PSDKP** yaitu **"Profesional, Integritas, Loyalitas, InovAtif dan sineRgi"** dan **core value "ASN BerAKHLAK"** mewujudkan PSDKP menjadi **Benteng KKP** yang **Hebat** dalam melindungi sumber daya kelautan dan perikanan.

Jakarta, 30 Januari 2023
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin

IKHTISAR EKSEKUTIF

Summary - Map

MV ALICA [MN]
607280000 / 800280000



Vessel information
Vessel name : Alica
MMSI : 607280000
Vessel type : general cargo
with container capacity
Shipowner : Realink Sendirian
Berhad
Capacity : 96 TEU
Length Overall (LOA) : 249.34
Built in : Jan 1987

Nearby Vessel
Identity change
Rendez-vous
Voyage
Alert
Events

There is no comment

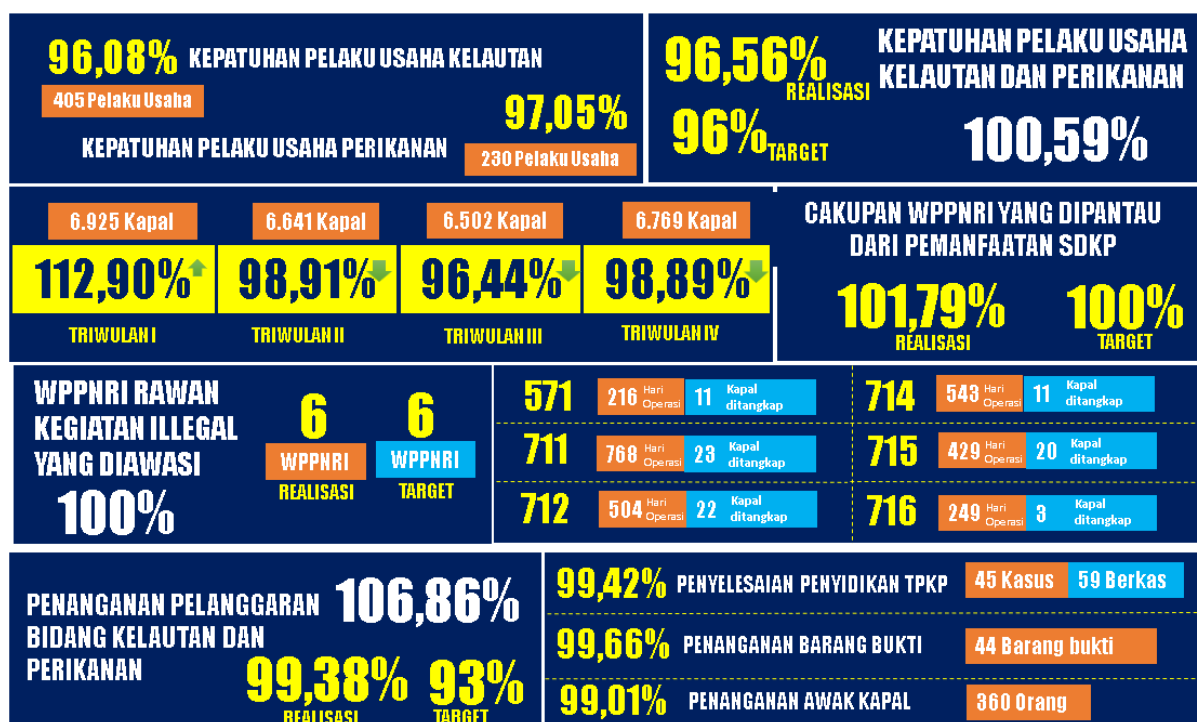
+ Create Report View reports



IKHTISAR EKSEKUTIF

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020 – 2024 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) ditetapkan untuk menjadi acuan kinerja dan kegiatan selama periode 5 tahun, kemudian disusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja. Melalui perjanjian kinerja tersebut, Ditjen PSDKP menetapkan 5 (lima) Sasaran Program dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja yang terdiri dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 15 Indikator Kinerja (IK) yang menjadi target Ditjen. PSDKP di tahun 2022.

Nilai Pencapaian Indikator Kinerja (IKU dan IK) Ditjen PSDKP Tahun 2022 mencapai 103,89%, dengan kategori “berhasil” seluruh indikator yang diperjanjikan tercapai melebihi target yang ditetapkan. Secara ringkas Capaian Indikator Kinerja Utama Ditjen PSDKP Tahun 2022, sebagai berikut:



Capaian tersebut tidak terlepas dari dilaksanakannya kegiatan prioritas tahun 2022 antara lain: Operasi Kapal Pengawas, Operasi Speedboat, *Airborne Surveillance*, pembangunan kapal pengawas dan speedboat pengawas, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan. Selain kegiatan teknis tersebut, keberhasilan pencapaian kinerja Ditjen PSDKP juga didukung oleh pelaksanaan kegiatan manajerial antara lain: Implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Implementasi Budaya Kerja “PILAR”.

Alokasi anggaran pasca *Automatic Adjustment* Ditjen. PSDKP TA. 2022 sebesar Rp.777.246.625.000,-. Anggaran tersebut didistribusikan pada 5 (lima) satker pusat, 14 (empat

belas) UPT Pengawasan SDKP dan 34 (tiga puluh empat) satker Dekonsentrasi. Realisasi Anggaran Ditjen. PSDKP sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.775.747.149.360; atau 99,81%. Dengan menimbang realisasi anggaran dan capaian kinerja ada, maka efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan Ditjen PSDKP pada tahun 2022 adalah sebesar 6,45.



**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DAFTAR ISI



Kata Pengantar



Ikhtisar Eksekutif



Bab I
Pendahuluan



Bab II
Perencanaan Kinerja



Bab III
Akuntabilitas Kinerja



Bab IV
Penutup



Lampiran



LAKSAMANA MUDA TNI Dr. ADIN NURAWALUDDIN, M.Han
DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



BAB I



#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) merupakan bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan diberikan tugas dan fungsi melaksanakan penataan dan penegakan hukum terhadap peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) yang tertib dan bertanggung jawab, sebagai salah satu perwujudan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 (Renstra KKP) yaitu pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar dirumuskan dalam Rencana Strategis Pengawasan SDKP. Dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2021-2024, Menteri Kelautan dan Perikanan mempunyai 5 (lima) program khusus berbasis ekonomi biru, yaitu:

- 1 Perluasan wilayah konservasi perairan**
- 2 Penerapan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota dan Zona Penangkapan**
- 3 Pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir, dan tawar yang berorientasi ekspor dan berbasis kearifan lokal**
- 4 Pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari kegiatan ekonomi yang merusak**
- 5 Pengurangan sampah plastik melalui gerakan nasional Bulan Cinta Laut**

Sebagai upaya mewujudkan program diatas, diperkuat dengan 3 (tiga) program utama, yaitu:

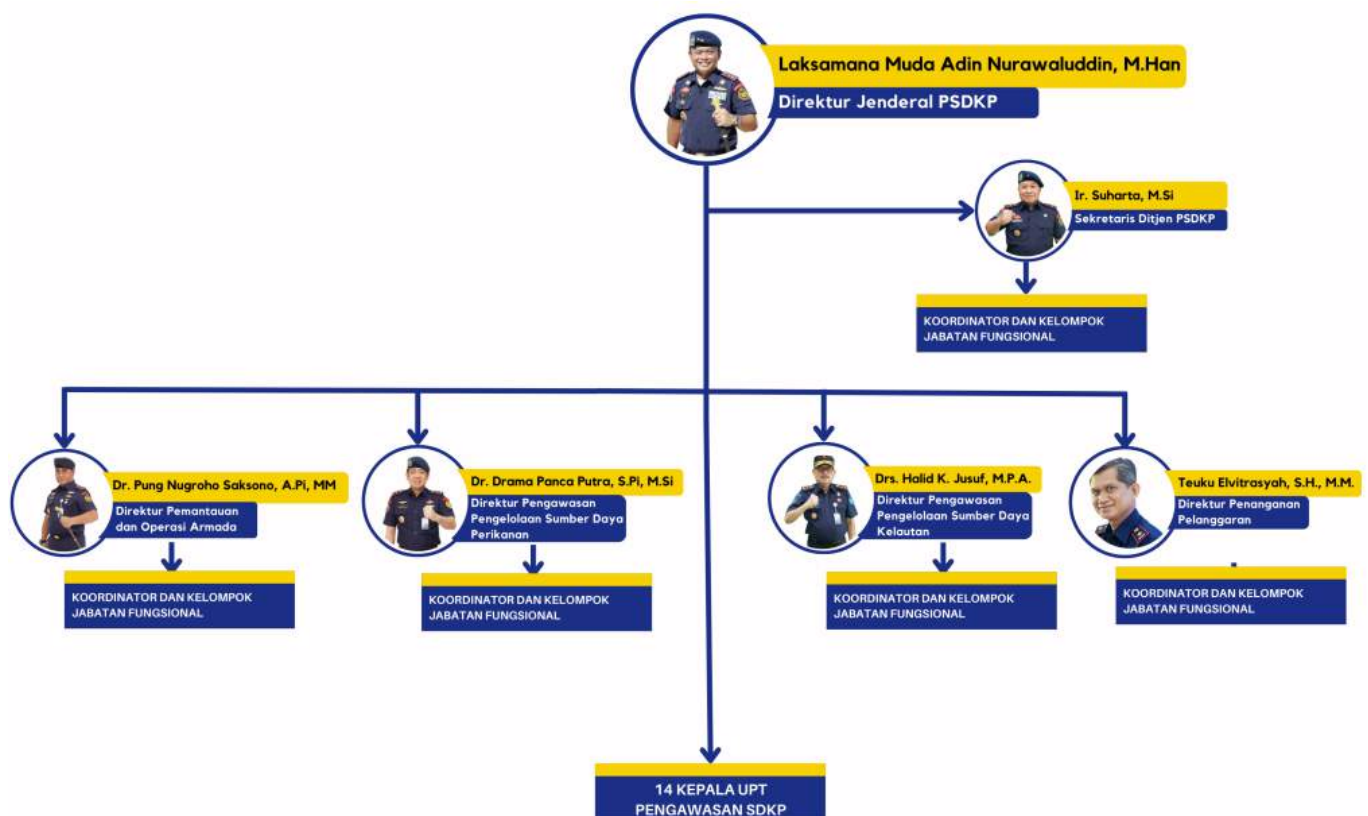
1. Peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan yang didukung dengan penjaminan kualitas mutu untuk peningkatan konsumsi domestik dan ekspor
2. Penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terintegrasi dengan teknologi satelit dan sistem karantina ikan
3. Penguatan kebijakan dan peningkatan kapasitas SDM untuk pengembangan usaha kelautan dan perikanan

A. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, tugas Ditjen. PSDKP adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan SDKP. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen. PSDKP menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan dibidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut ditetapkan struktur Organisasi Ditjen PSDKP sebagai berikut:



B. Isu Strategis Pengawasan SDKP

Isu strategis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan meliputi pemberantasan *IUU fishing* yang masih marak terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) baik dalam bentuk pencurian ikan oleh kapal-kapal perikanan asing (KIA) maupun penangkapan ikan dengan cara merusak (*destructive fishing*) dan tidak sesuai ketentuan oleh kapal-kapal perikanan Indonesia (KII) ditambah lagi dengan kompleksitas pemanfaatan sumber daya kelautan yang memberi dampak eksternalitas bagi sumber daya ikan dan lingkungannya.

Pemanfaatan Ruang laut menjadi isu strategis lainnya yang membutuhkan pengawasan secara tegas dalam mendukung program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Masih banyak pelaku usaha yang memanfaatkan ruang laut baik di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil maupun kawasan konservasi yang belum memiliki perizinan.

Pengenaan sanksi administrasi bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan sebagai upaya penegakkan hukum di bidang kelautan dan perikanan pasca Undang-undang Cipta Kerja. Adapun penindakan hukum menjadi langkah terakhir yang dilakukan untuk penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.

C. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Mengacu Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2015 secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN Menguraikan secara ringkas tentang kondisi umum yang mencakup tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP, isu aktual pengawasan SDKP, serta struktur organisasi Ditjen. PSDKP	BAB II PERENCANAAN KINERJA Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Penetapan Kinerja tahun 2022
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2022	BAB IV PENUTUP Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan



BAB II



**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

A. Rencana Strategis Ditjen PSDKP

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Melalui Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 23/KEP.DJ-PSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen. PSDKP diuraikan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen. PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen. PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen. PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Visi Ditjen PSDKP adalah:

“Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan”

Dengan misi:

- 1 Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi
- 2 Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan
- 3 Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggungjawab;
- 4 Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen PSDKP

2. Tujuan Dan Sasaran

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Ditjen. PSDKP maka dirumuskan beberapa Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024. Tujuan yang dimaksud adalah Tujuan KKP tahun 2020-2024 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen. PSDKP, yaitu:

- 1) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 2) Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui peningkatan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
- 3) Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- 4) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen. PSDKP.

Berdasarkan Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 tersebut maka disusunlah Sasaran Program Ditjen. PSDKP yang dirumuskan dari Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024 sebagaimana berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat
2. Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat
3. Pemantauan dan Operasi Armada efektif
4. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP
5. Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas

3. Indikator Kinerja Program

Berdasarkan rumusan Program dan Sasaran Program KKP, Ditjen. PSDKP berkontribusi pada 1 (satu) program teknis dan 1 (satu) program generik. Program Teknis adalah instrumen kebijakan teknis yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal) yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi KKP dalam periode waktu jangka menengah (5 tahun) yang bersifat indikatif. Sedangkan Program Generik adalah program yang bersifat pelayanan internal untuk menunjang pelaksanaan Program Teknis. Selanjutnya, untuk mengukur sejauh mana program-program tersebut efektif bekerja, maka dirumuskan Indikator Kinerja Program sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Program (*outcome*). Pada Indikator Kinerja Program tersebut ditetapkan pula satuan dan indikasi targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Program Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024

Program 1 Pengelolaan Perikanan dan Kelautan							
Sasaran program Indikator Kinerja		Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.1	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat						
	Tingkat partisipasi Pokmaswas Dalam Mendukung Pengawasan SDKP (%)	Persentase	85	86	87	88	90
1.2	Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat						
	Persentase kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Persentase	94	95	96	97	98
1.3	Pemantauan dan Operasi Armada efektif						
	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing (%)	Persentase	54,18	60	65	70	75
	Indeks kinerja Operasi Armada Pengawasan SDKP (indeks)	Indeks	86,72	87	87,5	88	89
1.4	Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas						
	Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan(%)	Persentase	93	93	93	93	93
Program 2 Dukungan Manajemen							
Sasaran program Indikator Kinerja		Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
2.1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP						
	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	Nilai	30	31	32	33	34
	Unit Kerja Ditjen. PSDKP Berpredikat Menuju WBK (unit)	Unit	4	5	6	7	8
	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPSDKP (%)	Persentase	1	1	1	1	1
	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	indeks	72	73	74	75	76
	Nilai PM SAKIP Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	Nilai	87,00	87,15	87,25	87,50	87,75
	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)	Unit	1	1	1	1	1
	Level maturitas SPIP lingkup Ditjen PSDKP (level)	Level	3	3	3	3	3
	Persentase unit kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	Persentase	82	84	86	88	90
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen. PSDKP (%)	Persentase	60	65	70	75	80
	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (indeks)	Indeks	88	89	89	90	90
	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	Nilai	85	86	87	88	89

Sumber: Kepdirjen Nomor 23a tentang Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2020-2024

Dalam perkembangan pelaksanaan kebijakan pengawasan SDKP setiap tahunnya telah terjadi perubahan sesuai dengan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kondisi tersebut berdampak terdapat indikator kinerja tahun 2022 berbeda dengan yang tercantum dalam renstra 2020-2024 yang selanjutnya dilakukan reviu terhadap renstra. Perubahan beberapa indikator kinerja tahun 2022 sebagaimana dibahas dibawah ini.

B. Perjanjian Kinerja

Pada awal tahun 2022 Ditjen PSDKP telah menetapkan 5 (lima) sasaran program dan 16 (enam belas) IKU. Ditjen. PSDKP melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja. Reviu dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pada tahun 2021 dan rekomendasi dari Inspektorat Jenderal KKP serta memperhatikan arahan kebijakan Menteri Kelautan dan perikanan. Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2022, telah dilakukan perubahan jumlah indikator kinerja dari 18 menjadi 19. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa perubahan target kinerja dalam perjanjian Kinerja yang tidak selaras dengan Rencana Strategis Ditjen. PSDKP 2020-2024. Pembahasan capaian dalam Laporan Kinerja menggunakan indikator kinerja dan target yang tercantum dalam perjanjian kinerja tahun 2022. Sasaran Program yang mengalami perubahan dan penambahan pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.2. Perubahan Sasaran Program Tahun 2022-2024

Sasaran pada renstra 2020-2024	Sasaran Program pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat	Tidak ada
Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat	Tata Kelola SDKP yang bertanggungjawab
Pemantauan dan Operasi Armada efektif	Pemantauan pemanfaatan SDKP yang efektif
Tidak ada	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang efektif
Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas	Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif
Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen. PSDKP	Tetap

Sementara itu, perubahan beberapa indikator kinerja, sebagai berikut:

Tabel 2.3. Perubahan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Indikator Kinerja pada renstra 2020-2024	Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022	Keterangan
Tingkat partisipasi Pokmaswas Dalam Mendukung Pengawasan SDKP (%)	Tidak ada	Menindaklanjuti hasil telaahan pada tahun 2020, indikator kinerja ini cukup dilevel II
Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan illegal fishing (%)	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan Pemanfaatan SDKP	Menindaklanjuti arahan Menteri Kelautan dan Perikanan pada Dialog Kinerja tahun 2022 agar pemantauan SDKP menggunakan Satelit, sehingga

Indikator Kinerja pada renstra 2020-2024	Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022	Keterangan
		nomenklatur dan formulasi penghitungannya disesuaikan berbasis keaktifan transmitter kapal perikanan
Indeks kinerja Operasi Armada Pengawasan SDKP (indeks)	Tidak ada	Menindaklanjuti hasil telaahan pada tahun 2020, indikator kinerja ini cukup dilevel II
Tidak ada	IKU 3. Jumlah WPPN NRI rawan kegiatan kelautan dan perikanan ilegal yang diawasi	Menindaklanjuti arahan Menteri Kelautan dan Perikanan pada Dialog Kinerja tahun 2022. Sehingga diformulasikan IKU baru untuk mengawasi WPPNRI menggunakan Kapal Pengawas, Pesawat Patroli dan Speedboat Pengawas.

Sejalan dengan diterbitkannya peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2022 tentang evaluasi sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, terjadi pergeseran target **“Nilai PM SAKIP Ditjen PSDKP” dari 87,25 menjadi 80,01**. Mempertimbangkan beberapa perubahan tersebut, maka perjanjian Kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2022 disajikan Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2022

Sasaran Program 1 : Tata Kelola SDKP yang bertanggungjawab			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	Persentase kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Persentase	96%
Sasaran Program 2 : Pemantauan pemanfaatan SDKP yang efektif			
2	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Pemanfaatan SDKP	Persentase	100%
Sasaran Program 3 : Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang efektif			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
3	Jumlah WPPN NRI rawan kegiatan kelautan dan perikanan ilegal yang diawasi	WPPNRI	6
Sasaran Program 4 : Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif			
4	Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	Persentase	93%
Sasaran Program 5 : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Ditjen PSDKP			
Indikator Kinerja		Satuan	Target
5	Nilai Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	Indeks	32
6	Indeks Kepuasan Masyarakat Penggunaan layanan Publik Ditjen PSDKP	Indeks	80

7	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	Indeks	70
8	Unit kerja yang berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Ditjen PSDKP	Unit	10
9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	Indeks	77
10	Nilai PM SAKIP lingkup Ditjen. PSDKP	Nilai	80,01
11	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan public	unit	1
12	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Direktorat Jenderal PSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020	Persentase	<1
13	Level Maturitas SPIP Ditjen. PSDKP	level	3
14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen PSDKP	Persentase	75
15	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jas Lingkup Ditjen PSKP	Persentase	75
16	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Ditjen. PSDKP	Persentase	86
17	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen. PSDKP	Persentase	70
18	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP	Nilai	89
19	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Ditjen. PSDKP	Nilai	86

C. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen utama implementasi pengelolaan kinerja dalam rangka menjamin akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi data kinerja yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja Ditjen. PSDKP dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual Indikator Kinerja.

Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung secara berkala (triwulanan) dan tahunan dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja tersebut, dimasukan kedalam Sistem Aplikasi Kinerjaku berbasis informasi teknologi melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id>, dan dituangkan dalam Laporan Kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya.



BAB III



18.03.2019 19:51

#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

A. Capaian Kinerja Pengawasan SDKP

Dalam pengelolaan kinerja Ditjen. PSDKP telah menetapkan 5 (lima) Sasaran Program dengan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja. Nilai Kinerja Organisasi Ditjen. PSDKP sebesar **103,89%**, yang diperoleh dari capaian Indikator kinerja utama dan indikator kinerja. Capaian kinerja Ditjen PSDKP Tahun 2022 disajikan pada tabel 3.1.

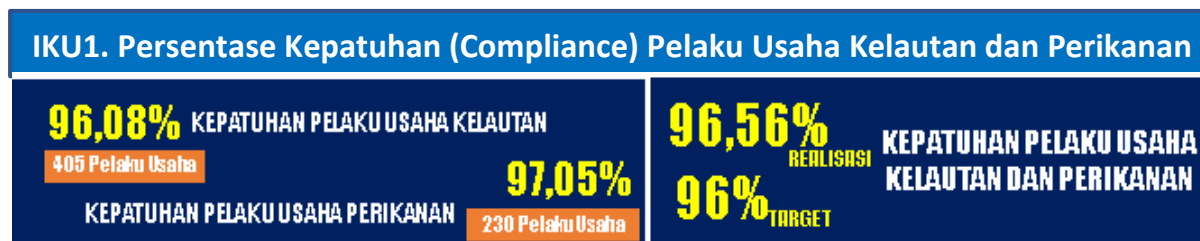
Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Ditjen. PSDKP Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	96%	96,56%	100,59
2	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Pemanfaatan SDKP (%)	100%	101,79%	101,79
3	Jumlah WPPNRI rawan kegiatan kelautan dan perikanan ilegal yang diawasi	6	6	100
4	Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan (%)	93%	99,38%	106,86
5	Indeks Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	32	34,72	108,50
6	Indeks Kepuasan Masyarakat Penggunaan layanan Publik Ditjen PSDKP (indeks)	80	91,40	114,25
7	Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP (nilai)	70	77,56	110,80
8	Unit kerja yang berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Ditjen PSDKP	10	12	120
9	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	77	80,55	104,61
10	Nilai PM SAKIP lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)	80,01	81,73	102,15
11	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan public (unit)	1	2	120
12	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Direktorat Jenderal PSDKP dibandingkan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020 (%)	<1	0,0001	120
13	Level Maturitas SPIP Ditjen. PSDKP(level)	3	3	100
14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Ditjen PSDKP (%)	75%	100%	120
15	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jas Lingkup Ditjen PSKP (%)	75%	90,58%	120
16	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Ditjen. PSDKP (%)	86%	95,10%	110,58
17	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen. PSDKP(%)	70%	99,11%	120
18	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen PSDKP (Nilai)	89	94,56	106,25
19	Nilai NKA lingkup Ditjen. PSDKP (nilai)	86	92,47	107,52

B. Evaluasi Dan Analisis

SASARAN PROGRAM 1

TATA KELOLA SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BERTANGGUNGJAWAB



Kepatuhan [*compliance*] pelaku usaha kelautan dan perikanan adalah kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan oleh para pelaku usaha kelautan dan perikanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan. IKU “Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan” terealisasi sebesar 96,56% melebihi target 96%. Apabila dibandingkan capaian kinerja Tahun 2022, target akhir tahun 2022 serta target jangka menengah atau rencana strategis Ditjen PSDKP 2020-2024, sebagaimana pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Perbandingan Target dan Realisasi IKU “Persentase kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan”

Indikator Kinerja utama	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2024
	T	R	T	R	T	R	T
IKU 1. Persentase kepatuhan (<i>compliance</i>) pelaku usaha kelautan dan perikanan	94%	94,76%	95%	95,72%	96%	96,56%	98%

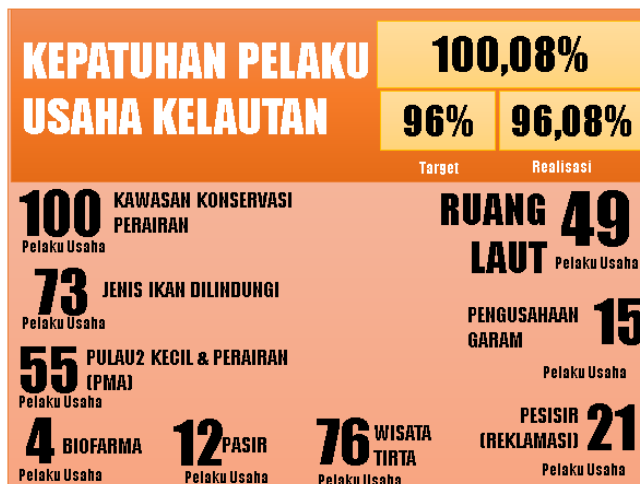
Realisasi kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan tahun 2022 tercapai dan jika dibandingkan Realisasi tahun 2021 meningkat sebesar 0,84%. Pencapaian kinerja Tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan didukung oleh komitmen Ditjen PSDKP dalam upaya menjaga konsistensi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai implementasi mendukung kebijakan terobosan kementerian kelautan dan perikanan. Selain itu, peningkatan kemampuan dan pengetahuan pengawas perikanan sepanjang tahun 2022 mengenai implementasi UUCK terus dilakukan sampai dengan saat ini.

Proyeksi kepatuhan pada akhir tahun 2024 sebesar 98% optimis tercapai apabila Ditjen PSDKP berupaya terus konsisten melaksanakan pengawasan SDKP sesuai dengan kebijakan Kementerian Kelautan dan perikanan khususnya untuk mengawal penangkapan ikan terukur. Mengingat tantangan pengawasan SDKP tersebut, maka perlu diupayakan strategi dan inovasi pengawasan SDKP, salah satunya melalui pemberian pemahaman secara menyeluruh kepada para pengawas perikanan dilapangan mengenai petunjuk teknis pengawas perikanan yang

sesuai dengan ketentuan terbaru. Peningkatan sinergitas dengan instansi terkait serta aparat penegak hukum juga perlu dilakukan.

Kontribusi kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terdiri dari kepatuhan pelaku usah kelautan dan kepatuhan pelaku usaha perikanan, sebagaimana diuraikan dibawah ini.

1. Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan



Kepatuhan pelaku usaha kelautan 2022 sebesar 96,08% tercapai melebihi target 96% atau 100,08%. Tahun 2022 pelaku usaha kelautan yang patuh sejumlah 405 pelaku usaha dari hasil verifikasi terhadap hasil pemeriksaan sebanyak 432 pelaku usaha. Capaian kinerja tersebut diperoleh dari persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan persentase kepatuhan

pelaku usaha kelautan terhadap perizinan berusaha atau perizinan pelaksanaan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ketidakpatuhan pelaku usaha kelautan dinominasi oleh persyaratan perizinan yang belum dipenuhi. Berdasarkan hasil pengawasan dan verifikasi dari sembilan objek pengawasan sebanyak 3 (tiga) objek yang tidak tercapai kepatuhannya yaitu: 1)Kawasan Konservasi; 2)Pengusahaan garam; 3)Penambangan Pasir.

1. Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Persentase kepatuhan pelaku usaha terhadap Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut tahun 2022 mencapai 98,00%. Capaian ini diperoleh dari hasil pengawasan terhadap 50 pelaku usaha pemanfaatan ruang laut, namun hanya 49 pelaku yang diverifikasi patuh terhadap PKKPRL. Direktorat Jenderal PSDKP berupaya meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha pemanfaatan ruang laut dan terhadap pelaku usaha yang tidak patuh maka dilakukan pembinaan dan pemberian teguran tertulis. Disamping itu, Direktorat Jenderal PSDKP berupaya terus bersinergi dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk mendorong pelaku usaha agar melakukan pengajuan PKKPRL bagi pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang bersifat menetap (lebih dari 30 hari).

2. Kepatuhan pelaku usaha kelautan terhadap perizinan berusaha atau perizinan

pelaksanaan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

Capaian kepatuhan pelaku usaha kelautan terhadap perizinan berusaha atau perizinan pelaksanaan lain sesuai ketentuan perundang-undangan tahun 2022 adalah sebesar 93,19% yang diperoleh dari 356 pelaku usaha yang patuh dari 382 pelaku usaha yang diperiksa, rincian pelaku usaha sebagai berikut:

Table 3.3. Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan terhadap Perizinan Berusaha Berusaha/Perizinan Pelaksanaan Lain sesuai Ketentuan Perundang-Undang Tahun 2022

No	Uraian	Diperiksa	Patuh
1.	Pelaku Usaha Penangkapan/Pengambilan dan Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES	74	73
2.	Pengusaha Garam	16	15
3.	Pemanfaatan wilayah pesisir (Reklamasi)	21	21
4.	Pemanfaatan wilayah pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya oleh PMA	56	55
5.	Wisata tirta lainnya	80	76
6.	Pemanfaatan Kawasan konservasi perairan	116	100
7.	Biofarmakologi	4	4
8.	Pasir	15	12

Kegiatan pengawasan sumber daya kelautan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian kinerja, sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap pelaku usaha Penangkapan/Pengambilan dan Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES. Hasil pengawasan menunjukkan 73 pelaku usaha patuh dari 34 pelaku usaha yang diperiksa. Kepatuhan pelaku usaha Penangkapan/Pengambilan dan Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Termasuk dalam Appendiks CITES dilakukan terhadap kesesuaian dokumen perizinan berusaha yang dimiliki dengan aktivitas yang dilaksanakan. Adapun 1 pelaku usaha yang tidak patuh ditemukan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Bitung yang melakukan kegiatan berusaha namun tidak dilengkapi dengan Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI). Terhadap pelaku usaha tidak patuh dilakukan pengenaan sanksi sebagaimana telah diatur pada peraturan perundang-undangan.
2. Pengawasan terhadap pelaku usaha Ekstraksi Garam. Pengawasan terhadap pelaku usaha ekstraksi garam dilakukan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta, Stasiun PSDKP Kupang dan Stasiun PSDKP Cilacap, dimana ditemukan 15 pelaku usaha patuh dari 16 pelaku usaha yang diawasi. Pelaku usaha tidak patuh ditemukan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Kupang. Pelaku usaha dimaksud melakukan kegiatan ekstraksi

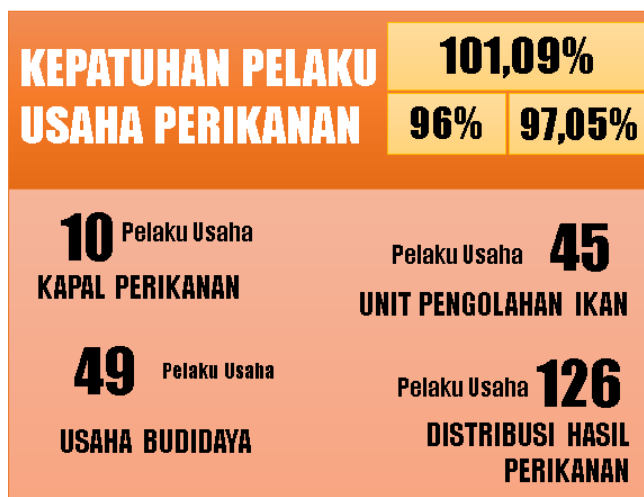
garam namun tidak memiliki dokumen perizinan. Terhadap pelaku usaha dimaksud telah diberikan rekomendasi untuk segera melakukan pengurusan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pengawasan terhadap pelaku usaha pemanfaatan wilayah pesisir (Reklamasi). Pengawasan telah dilakukan terhadap 21 pelaku usaha reklamasi di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Batam, Pangkalan PSDKP Jakarta, Pangkalan PSDKP Benoa, Stasiun PSDKP Tarakan, Stasiun PSDKP Cilacap, Stasiun PSDKP Kupang dan Stasiun PSDKP Pontianak. Berdasarkan pengawasan yang telah dilakukan, diketahui bahwa seluruhnya memiliki dokumen perizinan kegiatan reklamasi.
4. Pengawasan terhadap pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya oleh PMA. Pengawasan terhadap pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya oleh PMA telah dilakukan terhadap 56 pelaku usaha. Adapun pengawasan dilakukan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Lamplo, Pangkalan PSDKP Batam, Pangkalan PSDKP Bitung, Pangkalan PSDKP Tual, Stasiun PSDKP Pontianak Stasiun PSDKP Tahuna, Stasiun PSDKP Cilacap, Stasiun PSDKP Belawan dan Stasiun PSDKP Kupang. Berdasarkan pengawasan yang telah dilakukan, diketahui bahwa 55 pelaku usaha dimaksud telah memiliki dokumen perizinan kegiatan reklamasi, sedangkan 1 pelaku usaha lagi tidak patuh yang selanjutnya diberikan pembinaan untuk melakukan pengajuan perizinan berusaha sesuai ketentuan.
5. Pengawasan terhadap pelaku usaha wisata tirta lainnya. Pengawasan telah dilakukan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Bitung, Pangkalan PSDKP Benoa, Pangkalan PSDKP Jakarta, Pangkalan PSDKP Bitung, Stasiun PSDKP Kupang,, Stasiun PSDKP Tarakan Stasiun PSDKP Belawan dan Pangkalan PSDKP Batam. Berdasarkan hasil pengawasan ditemukan 76 pelaku usaha patuh dari 80 pelaku usaha yang dilakukan pengawasan. Adapun 4 pelaku usaha tidak patuh ditemukan di Pangkalan PSDKP Benoa sebanyak 3 pelaku usaha dan Pangkalan PSDKP Jakarta sebanyak 1 pelaku usaha. Keempat pelaku usaha dimaksud melakukan kegiatan wisata tirta lainnya tanpa dilengkapi dokumen perizinan. Terhadap para pelaku usaha dimaksud telah diberikan rekomendasi untuk segera melakukan pengurusan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengawasan terhadap pelaku usaha pemanfaatan Kawasan konservasi perairan. Pengawasan telah dilakukan di 10 kawasan konservasi perairan nasional yaitu TWP Pieh, TWP Anambas, TNP Laut Sawu, TWP Padaido, TWP Laut Banda, SAP Aru Bagian Tenggara, SAP Waigeo Sebelah Barat, TWP Kapoposang, SAP Raja Ampat dan TWP Gili Matra. Berdasarkan hasil pengawasan ditemukan 100 pelaku pemanfaatan kawasan konservasi yang dikategorikan patuh dan 16 pelaku usaha tidak patuh. Ketidapatuhan

pelaku usaha disebabkan oleh ketiadaan dokumen perizinan kegiatan penangkapan ikan dengan kapal di bawah 10 GT di zona perikanan berkelanjutan. Terhadap para pelaku telah direkomendasikan untuk segera melakukan pengurusan perizinan.

7. Pengawasan terhadap pelaku usaha biofarmakologi. Pengawasan terhadap pelaku usaha biofarmakologi telah dilakukan oleh Pangkalan PSDKP Batam dan Pangkalan PSDKP Benoa. Pengawasan dilakukan terhadap 4 pelaku usaha dimana keempat pelaku usaha telah memiliki dokumen perizinan pelaksanaan kegiatan.
8. Pengawasan terhadap pelaku usaha pemanfaatan pasir laut. Sampai tahun 2022, pengawasan terhadap 15 pelaku usaha pemanfaatan pasir laut dilakukan oleh Pangkalan PSDKP Batam, Pangkalan PSDKP Bitung, Pangkalan PSDKP Jakarta, Stasiun PSDKP Belawan dan Stasiun PSDKP Tahuna. Berdasarkan hasil pengawasan terdapat 12 pelaku usaha patuh dan 3 pelaku usaha tidak patuh. 2 (dua) pelaku usaha Sedangkan 1 pelaku usaha tidak patuh yang berada di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Batam merupakan pelaku usaha yang melakukan kegiatan penambangan pasir laut yang menimbulkan kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya melakukan kegiatan pemanfaatan pasir tanpa dilengkapi dokumen perizinan. Terhadap pelaku usaha dimaksud telah diberikan rekomendasi untuk pengurusan perizinan sesuai ketentuan perundang-undangan.

2. Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan



Kepatuhan pelaku usaha perikanan diperoleh dari rata-rata persentase kepatuhan: 1) Pelaku usaha kapal perikanan; 2) Pelaku usaha pengolahan ikan; 3) Pelaku usaha distribusi hasil perikanan; dan 4) Pelaku usaha budidaya perikanan. Pengawasan dilakukan terhadap kesesuaian kegiatan pelaku usaha perikanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara umum pencapaian kinerja tahun 2022 sebesar 97,05% telah melebihi target

yang ditetapkan 96%, meningkat sebesar 0,1% dari tahun 2021. Capaian tersebut diperoleh dari perbandingan antara jumlah pelaku usaha yang patuh sejumlah 230 pelaku usaha dengan jumlah yang terdaftar pada aplikasi OSS sejumlah 237 pelaku usaha.

Kriteria Kepatuhan pelaku usaha perikanan yang harus memenuhi kepatuhan teknis pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha sesuai kewenangan

Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria kementerian/lembaga. Penilaian kepatuhan teknis mencakup:

- a. Pemenuhan persyaratan umum usaha;
- b. Pemenuhan persyaratan khusus usaha;
- c. Pemenuhan sarana;
- d. Kesesuaian struktur organisasi dan SDM;
- e. Pemenuhan pelayanan;
- f. Pemenuhan persyaratan produk/proses/jasa;
- g. Pemenuhan sistem manajemen usaha.

Pelaku usaha perikanan yang patuh sejumlah 230 pelaku usaha terdiri dari 10 pelaku usaha penangkapan ikan, 45 pengolah ikan, 49 usaha budidaya dan 126 pelaku usaha distribusi hasil perikanan. Apabila dibandingkan dengan hasil pengawasan tahun 2021 sejumlah 4.186 pelaku usaha yang patuh, menurun sangat signifikan termasuk jumlah yang dilakukan pemeriksaan. Hal utama yang mempengaruhi perbedaan capaian yaitu pada tahun 2022 telah menerapkan pengawasan berbasis risiko sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perikanan.

Meskipun capaian telah terpenuhi melebihi target, namun terdapat beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut:

- a. Masih ditemukan pelaksanaan pengawasan tidak sesuai dengan rencana pengawasan yang ditetapkan;
- b. Beberapa permasalahan yang ditemukan di lapangan seperti perbedaan KBLI, Alamat perusahaan, dan perusahaan yang sedang menjalani sanksi administrasi perlu ditindaklanjuti berupa koordinasi dengan pihak terkait agar bisa diselesaikan dan berjalan sesuai dengan ketentuan.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah percepatan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Melakukan pendampingan secara khusus tentang pelaksanaan pengawasan berbasis risiko kepada pengawas perikanan di UPT PSDKP;
- b. Koordinasi dengan BKPM terkait dengan rencana pengawasan selama satu tahun penuh serta dilakukan monitoring dan evaluasi bersama-sama;

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai kinerja antara lain:

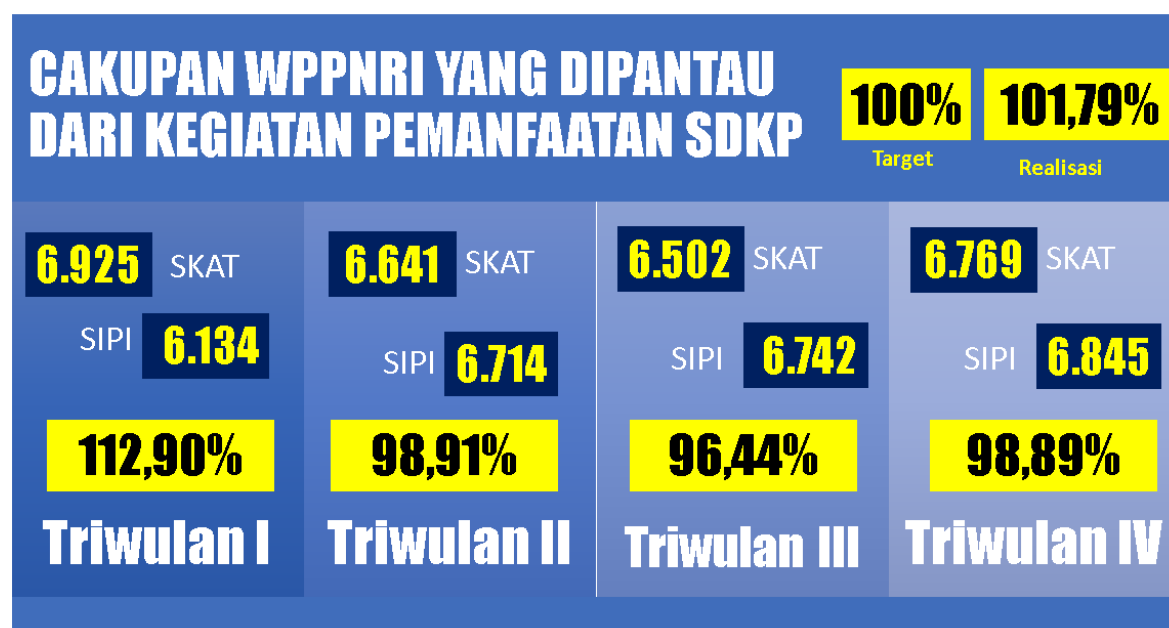
1. Pengawasan perikanan rutin dan terjadwal di 14 UPT pengawasan SDKP,
2. Rapat Kerja Nasional Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Kelautan dan Perikanan
3. Sosialisasi Kebijakan Penggunaan Alat Penangkap Ikan (API) yang Dilarang (Peraturan Menteri KP No. 18 Tahun 2021) terhadap nelayan pengguna Bondet, Dogol, dan Arad di Cirebon, Provinsi Jawa Barat.

4. Sosialisasi Kebijakan Larangan Pembudidayaan Ikan yang Membahayakan dan Merugikan dilaksanakan di Magelang, Jawa Tengah.
5. Sosialisasi Kebijakan Pengawasan Lalu Lintas Produk Hasil Perikanan (Lobster, Kepiting, dan Rajungan) di Desa Nglebeng, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur.
6. Sosialisasi Kebijakan Larangan Penggunaan Bahan Tambahan Berbahaya Bagi Produk Hasil Perikanan di Palembang, Sumatera Selatan.
7. Supervisi Penggunaan API yang dilarang di Sungai Citanduy dan Ciseel Kabupaten Pangandaran,
8. Penguatan Pengawasan dalam Mendukung Program Prioritas KKP: Penguatan kapasitas pengawasan pembudidayaan ikan Simulasi pengawasan perikanan pasca produksi Penguatan Pengawasan perikanan di Makassar, Batam dan Kampung Nelayan Penguatan pengawasan Distribusi Produk Perikanan Tertentu (BBL)
9. Penyusunan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pengawas Perikanan dan Penyusunan Matriks Daftar Inventaris Masalah Permen KP Nomor:47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan
10. Menyusun Rancangan Permen KP tentang Perubahan atas Permen KP Nomor 17 tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*) dan Rajungan (*Portunus spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia

SASARAN PROGRAM 2

PEMANTAUAN PEMANFAATAN SDKP YANG EFEKTIF

IKU 2. Persentase Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yang dipantau dari kegiatan Pemanfaatan SDKP



Indikator Kinerja Utama (IKU) ini bertujuan untuk memastikan WPP-NRI atau Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terbebas dari kegiatan *IUU Fishing. Illegal, Unreported and Unregulated Fishing [IUU Fishing]* yaitu kegiatan perikanan melanggar hukum, tidak dilaporkan dan tidak diatur yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia [KII] di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia [WPP NRI]. Pemantauan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di WPP NRI dilakukan dengan menggunakan teknologi satelit.

Pencapaian IKU “Persentase cakupan WPP-NRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan SDKP” diperoleh dari hasil pemantauan terhadap kapal perikanan yang sudah mengajukan keaktifan Transmitter dengan diterbitkannya Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) dibandingkan dengan kapal perikanan yang memiliki izin (izin pusat). Dokumen SKAT yang diterbitkan merupakan bukti bahwa kapal perikanan sudah memiliki perangkat transmitter SPKP yang sudah dapat dipantau melalui satelit. Dalam penerbitannya, dokumen diberikan dalam format kartu **NFC** yang memiliki masa berlaku sama dengan masa berlaku *airtime* transmitter SPKP yang terpasang. Hal ini untuk memastikan bahwa kapal selama periode masa berlaku dapat terpantau melalui satelit. Sampai dengan Tahun 2022, didapatkan nilai capaian sebesar 101,79% dari target 100%, capaian tersebut diperoleh dari rata-rata kepatuhan triwulan I-Triwulan IV. Namun apabila ditinjau dari capaian triwulan II-IV tidak mencapai 100% disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

1. Kapal sudah memiliki izin namun belum mengajukan pengaktifan transmitter SPKP melalui penerbitan kartu SKAT;
2. Kapal belum melakukan perpanjangan kartu SKAT karena belum beroperasi kembali.

Namun capaian pada triwulan I menunjukkan nilai yang sebaliknya yaitu diatas 100%, yang disebabkan:

1. Kapal sudah memiliki izin namun belum mengajukan pengaktifan transmitter SPKP melalui penerbitan kartu SKAT;
2. Kapal belum melakukan perpanjangan kartu SKAT karena belum beroperasi kembali.

Perbandingan capaian dengan tahun-tahun sebelumnya dan target renstra 2024, sebagai berikut:

Tabel 3.4.

Perbandingan Target dan Capaian IKU Persentase Cakupan WPP-NRI yang dipantau dari kegiatan Pemanfaatan SDKP”

Indikator Kinerja	2020	2021	2022		2024	
	R	R	T	R	%	Target
IKU 2. Persentase Cakupan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yang dipantau dari kegiatan Pemanfaatan SDKP	-	-	100%	101,79%	101,79	-

Ket: T=Target, R=Realisasi

Realisasi tahun 2022 tidak bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena nomenklatur dan formulasi berbeda, termasuk dengan target akhir renstra 2020-2024. Pada Renstra 2020-2024 indikator kinerja nya adalah Persentase Cakupan WPP-NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal fishing. Formulasi perhitungannya menggunakan cakupan operasi Kapal penagas, pesawat patroli dan speedboat pengawas. Kegiatan yang dilakukan dalam mendukung pencapaian kinerja antara lain:

1. Analisis Indikasi Pelanggaran

Selain dari pemantauan tingkat keaktifan kapal dalam mengaktifkan transmiter, kapal juga dipantau pergerakannya agar tetap patuh terhadap peraturan-peraturan lainnya yang berlaku. Salah satunya adalah dengan menerbitkan indikasi pelanggaran melalui pemantauan SPKP. Jenis-jenis indikasi pelanggaran antara lain pelanggaran Daerah Penangkapan Ikan (DPI), laut lepas, pelabuhan pangkal, Jalur Penangkapan, beroperasi di kawasan konservasi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilarang. Selama tahun 2022, diterbitkan analisis indikasi pelanggaran kapal perikanan sebanyak 2.372 kapal dengan rincian sebagaimana pada Tabel dibawah sebagai berikut:

Tabel 3.5. Indikasi Pelanggaran Kapal Perikanan

No	Indikasi Pelanggaran	Jumlah
1	Daerah Penangkapan Ikan (WPP)	1971
2	Daerah Penangkapan Ikan (Laut Lepas)	172
3	Daerah Penangkapan Ikan (Luar Negeri)	118
4	Daerah Penangkapan Ikan (Jalur Penangkapan)	71
5	Pelabuhan Pangkal/Muat	24
6	Beroperasi tanpa SIPI/SIKPI	16
	TOTAL	2.372

2. Analisis Kapal di Kawasan Konservasi

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU 31/2004, menjelaskan bahwa konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan. Dalam konteks konservasi sumber daya ikan, konservasi ekosistem merupakan upaya melindungi, melestarikan dan memanfaatkan fungsi ekosistem sebagai habitat penyangga kehidupan biota perairan pada waktu sekarang dan yang akan datang.

Sesuai dengan peraturan tersebut Kelompok Bidang Operasi Pusat Pengendalian pada

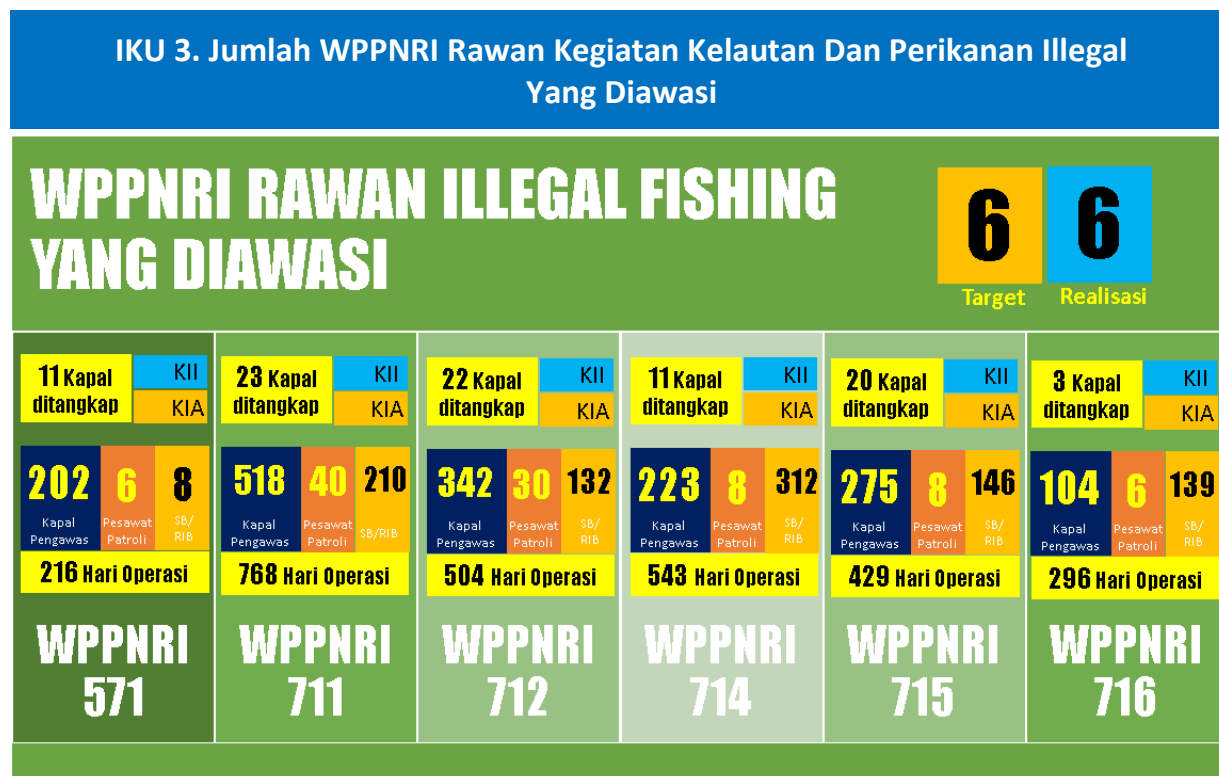
periode 2022 dilakukan pemantauan terhadap Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia dan terdapat 14 kawasan konservasi yang terpantau terdapat kapal yang melakukan indikasi kegiatan penangkapan dan/atau labuh di dalam kawasan konservasi. Rincian jumlah kapal yang beroperasi di Kawasan Konservasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.6. Rincian jumlah kapal yang beroperasi di Kawasan Konservasi

No.	Kawasan Konservasi	Hasil pemantauan
1	KKP buruway, arguni, teluk etna, dan perairan sekitarnya di provinsi papua barat	19
2	KKP gugusan pulau-pulau momparang dan perairan sekitarnya kabupaten belitung timur di provinsi kepulauan bangka belitung	0
3	KKP kepulauan raja empat kabupaten raja empat di provinsi papua barat	16
4	KKP sawo-lahewa dan perairan sekitarnya kabupaten nias utara di provinsi sumatera utara	16
5	KKP selat bunga laut kabupaten kepulauan mentawai di provinsi sumatera barat	7
6	KKP3K kepulauan derawan dan perairan sekitarnya di kabupaten berau provinsi kalimantan timur	8
7	KKP3K pulau kei kecil, pulau-pulau dan perairan sekitarnya di kabupaten maluku tenggara provinsi maluku	1
8	kawasan konservasi selat pantar dan laut sekitarnya	3
9	SAP kepulauan raja empat dan laut sekitarnya di provinsi papua barat	1
10	SAP kepulauan waigeo sebelah barat dan laut sekitarnya di provinsi papua barat	3
11	SAP kepulauan aru bagian tenggara dan laut sekitarnya di provinsi maluku	162
12	TNP laut sawu dan sekitarnya di provinsi nusa tenggara timur	6
13	TWP kepulauan anambas dan laut sekitarnya di provinsi kepulauan riau	211
14	Taman Wisata Perairan (TWP) Laut Banda Di Provinsi Maluku	1

SASARAN PROGRAM 3

PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG EFEKTIF



WPP-NRI atau Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

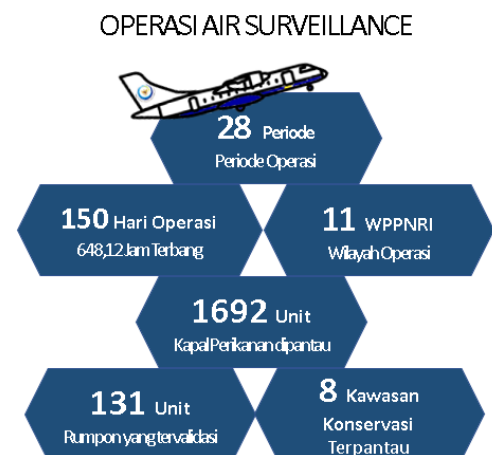
WPP NRI rawan kegiatan kelautan dan perikanan illegal didasarkan pada Indeks Kerawanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang ditentukan oleh kriteria: Potensi sumber daya ikan, Wilayah perbatasan dengan negara tetangga, Jumlah izin kapal perikanan (Pusat), Indikasi aktivitas illegal kapal ikan asing, Jumlah kasus pelanggaran perikanan 3 tahun terakhir, Jumlah kasus pelanggaran kelautan 3 tahun terakhir, Zona Fishing Industri Penangkapan Terukur. Kriteria suatu WPP NRI yang diawasi ditetapkan adalah sekurang-kurangnya dilakukan pengawasan selama 1 periode operasi (10-15 hari operasi) kapal pengawas dan/atau speedboat pengawas/pesawat patroli.

Sampai dengan tahun 2022, Indikator Kinerja telah tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu 6 WPPNRI yaitu: 571, 711, 712, 714, 715, 716. Adapun kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja sudah dilaksanakan, antara lain:

1. Operasi Kapal Pengawas. Sampai dengan Tahun 2022 telah dilaksanakan operasi 30 Kapal Pengawas rata-rata 66 hari di 11 WPPNRI. Berdasarkan hasil operasi telah dilakukan pemeriksaan terhadap 3.231 kapal terdiri dari 3.205 KII, 26 KIA, dan ditangkap sebanyak 97 Kapal terdiri dari 79 KII, 18 KIA)

- Pengawasan melalui Udara menggunakan pesawat patroli "MPA ATR 42-300 PK-YRE" dan "Hawker 900XP. Kegiatan pengawasan telah dilaksanakan selama 28 periode atau 150 hari yang meliputi 11 WPPNRI.

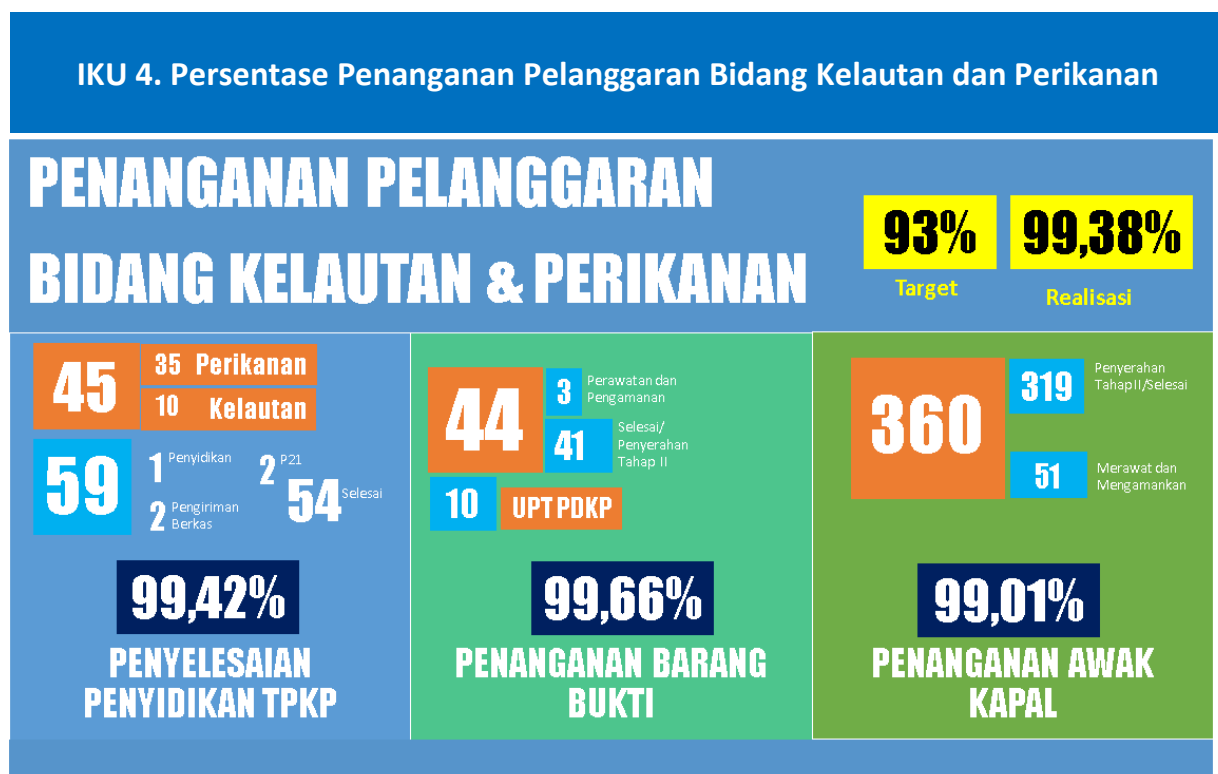
Tahun 2022, juga telah dilaksanakan dukungan Patroli Bersama Gannet AUSINDO - 6 2022 di WPPNRI 711,713 dan 573 dan berintegrasi dengan Kapal Pengawas Orca 02. KN. Pulau DANA 323 dan ABF Cape Size Vessel dengan hasil langsung operasi Integrasi Penerusan informasi keberadaan Kapal Perang China, Jepang dan Kapal Induk dan Pemantauan Kawasan Konservasi Anambas dan Laut Sawu.



Indikator kinerja ini merupakan Indikator kinerja baru sehingga tidak bisa dibandingkan target dan capaiannya dengan periode tahun sebelumnya juga dengan target Renstra 2024.

SASARAN PROGRAM 4

PENANGANAN PELANGGARAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG EFEKTIF



Persentase penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan diperoleh dari perkembangan proses penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan

berdasarkan tahapan-tahapan proses penyidikan, mulai tahapan gelar perkara awal sampai dengan penyerahan berkas perkara dari PPNS kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sementara itu, penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Direktorat Penanganan Pelanggaran merupakan capaian perkembangan tahapan penanganan barang bukti pelaku TPKP berdasarkan tahapan-tahapan penanganan barang bukti yang dimulai dari tahapan penerimaan barang bukti sampai dengan penyerahan ke instansi terkait. Sedangkan penanganan Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan merupakan capaian perkembangan tahapan Penanganan dan Awak Kapal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan penanganan awak kapal TPKP yang dimulai dari tahapan penerimaan awak kapal sampai dengan penyerahan ke instansi terkait. Setiap tahapan proses penyidikan, penanganan barang bukti dan awak kapal diberikan bobot berbeda-beda berdasarkan manual IKU yang ditetapkan.

Perbandingan capaian kinerja dengan target di tahun 2021 serta target jangka menengah atau rencana strategis tahun 2020-2024, sebagaimana pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7.

Target dan Capaian IKU “Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja utama	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2024
	T	R	T	R	T	R	T
IKU4. Persentase Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	93%	86,78%	93%	98,05%	93%	99,38%	93%

Persentase pertumbuhan penanganan pelanggaran tahun 2022 meningkat sebesar 1,33% dari tahun 2021. Hal ini dikarenakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) pada tanggal 2 November 2020, nuansa baru bagi penegakan hukum di Indonesia sangat terlihat. Pendekatan yang digunakan dalam UUCK adalah pendekatan risk based monitoring atau pemantauan berbasis risiko. Keterbaruan yang diamanatkan dalam UUCK tidak lagi berorientasi pada pemidanaan, namun juga terdapat pada sanksi administrasi yang menjadi tumpuan utama dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul. Kemampuan PPNS yang meningkat dalam menyelesaikan Kasus yang diproses menjadi salah satu faktor utama tercapainya kinerja ini. Capaian Tahun 2022 diperoleh dari perhitungan 3 (tiga) kegiatan utama penanganan pelanggaran yaitu:

No	Uraian	Realisasi	Bobot	Nilai
1	Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	99,42%	50%	49,71%
2	Penanganan Barang Bukti	99,66%	25%	24,92%
3	Penanganan Awak Kapal	99,01%	25%	24,75%
NILAI CAPAIAN				99,38%

1. Penyelesaian Penyidikan TPKP

Salah satu kontribusi besar tingginya capaian kinerja penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan adalah penyelesaian penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP). Persentase penyelesaian penyidikan TPKP merupakan capaian perkembangan yang telah dilaksanakan berdasarkan tahapan-tahapan proses penyidikan mulai tahapan gelar perkara awal sampai dengan penyerahan berkas perkara dari PPNS kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Setiap tahapan proses penyidikan diberikan bobot berbeda-beda berdasarkan manual IKU yang ditetapkan.

Capaian penyelesaian penyidikan TPKP diperoleh dari kasus yang diproses hukum sebanyak 45 kasus dengan 59 berkas yang diproses hukum, kasus yang sudah mencapai tahap II (100%) sebanyak 40 kasus atau sekitar 88,89%. Sedangkan nilai capaian sebesar 99,42% diperoleh dari proses penyelesaian sebagai berikut:

No	Unit Kerja	Jumlah Kasus	Jumlah Berkas	Tahapan penyelesaian	%
1	Batam	6	6	4 Tahap II (selesai), 2 P21	99,33
2	Lampulo	7	8	7 Tahap II (selesai), 1 pengiriman berkas	99,38
3	Benoa	1	1	Selesai	100
4	Bitung	10	20	Selesai	100
5	Tual	1	1	Selesai	100
6	Cilacap	1	2	1 tahap II, 1 Penyidikan	90
7	Tahuna	2	2	1 Tahap II, 1 pengiriman berkas	97,50
8	Tarakan	1	3	selesai	100
9	Belawan	11	11	selesai	100
10	Pontianak	5	5	selesai	100
		45			99,42

Sebanyak 45 kasus tindak pidana kelautan dan perikanan (TPKP) yang sudah proses hukum, 10 kasus merupakan tindak pidana kelautan (TPK) dan 37 kasus tindak pidana perikanan (TPP). Untuk mengetahui perkembangan proses penyidikan dan memastikan proses penyidikan sesuai dengan Juknis Penyidikan TPKP, dilaksanakanlah supervisi kasus. Selain itu, supervisi kasus mendukung percepatan penanganan TPKP yang diproses oleh PPNS Perikanan, memecahkan masalah, hambatan, atau kendala yang dihadapi oleh Penyidik. Sepanjang tahun 2022 ini, telah dilaksanakan supervisi kasus di yaitu 8 lokasi supervisi Tindak pidana perikanan dan 2 lokasi supervisi Tindak pidana kelautan

Untuk mendukung koordinasi dengan instansi K/L terkait dan kerja sama penegakan hukum di pusat maupun daerah, dilaksanakan pertemuan atau Forum Koordinasi yang dimaksudkan dapat memberikan informasi/peraturan/regulasi yang berlaku, serta membahas dan merumuskan rekomendasi sehingga tercipta kesepahaman bersama antar K/L terhadap penanganan TPKP. Tahun 2022 telah dilaksanakan Forum Koordinasi

Tingkat Pusat 1 kali dan Forum Koordinasi Daerah di 7 lokasi. Forum Koordinasi tingkat Pusat dilaksanakan pada tanggal 1 April 2022 di Jakarta. Sedangkan Forum Koordinasi tingkat Daerah tahun 2022 telah dilaksanakan di lokasi-lokasi berikut:

- (1) Provinsi Jawa Barat pada tanggal 24 Maret 2022
- (2) Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 11 Juli 2022
- (3) Provinsi Papua pada tanggal 15 Februari 2022 dan 14 Juli 2022
- (4) Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 24-27 Juli 2022
- (5) Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 25 Mei 2022
- (6) Kabupaten Maluku Utara pada tanggal 11 Agustus 2022
- (7) Kabupaten Sangihe pada tanggal 24 Mei 2022

Salah satu kesimpulan dalam forum koordinasi dengan instansi terkait adalah pentingnya koordinasi dengan instansi terkait seperti Kejaksaan dalam proses penanganan perkara untuk kelancaran proses penyidikan hingga P21 Tahap II. Dan juga koordinasi dalam rangka pemanfaatan barang bukti kapal perikanan untuk kelompok nelayan.

2. Penanganan Barang Bukti

Persentase Penyelesaian Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan merupakan capaian perkembangan tahapan Penanganan Barang Bukti pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan penanganan barang bukti yang dimulai dari tahapan penerimaan barang bukti sampai dengan penyerahan ke instansi terkait sesuai dengan Keputusan Dirjen PSDKP Nomor: KEP.378/DJ-PSDKP/2013 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan.

Selama kurun waktu tahun 2022 jumlah barang bukti yang ditangani sebanyak 44 unit dari 45 kasus yang masuk dalam proses hukum. Kondisi ini juga yang mempengaruhi tingginya capaian kinerja di periode tahun 2022. Tahapan penanganan barang bukti sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.8. Proses penanganan barang bukti TPKP tahun 2022

No	Tahapan Penanganan	Jumlah	%
1	Penyitaan barang bukti TPKP	-	-
2	Penempatan atau penyimpanan barang bukti TPKP di tempat yang memadai dan pemberian identitas barang bukti	-	-
3	Perawatan dan pengamanan barang bukti sampai berkas perkaranya diserahkan kepada kejaksaan, proses penyidikan dihentikan (SP3) atau penitipan barang bukti ke Rupbasan atau tempat lain yang memadai	3 unit	95%
4	Penyerahan tahap II	41 unit	100%
	Total	44 unit	99,66%

Kegiatan pendukung untuk perkembangan proses penanganan barang bukti TPKP dilaksanakanlah supervisi penanganan barang bukti yang sudah dilaksanakan di 10 lokasi UPT lingkup Ditjen PSDKP. Dalam rangkaian kegiatan supervisi ini, penyelesaian tahapan penanganan seperangkat barang bukti dalam pembuktian satu perkara TPKP atau lebih yang berkaitan sejak barang bukti tersebut disita sampai dengan diserahkan kepada Penuntut Umum (P21 Tahap II).

Selain kegiatan supervisi penanganan barang bukti, juga dilaksanakan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas kemampuan petugas barang bukti pada tanggal 2 Juni 2022 di kantor pusat KKP. Maksud dilaksanakannya bimbingan teknis ini adalah meningkatkan pengetahuan penanggung jawab/petugas barang bukti dalam aspek teknis dan aspek administrasi dalam penanganan barang bukti untuk mendukung proses penyidikan dan kerja sama yang dapat dilakukan dengan K/L terkait penanganan barang bukti.

Barang bukti TPKP berupa kapal ini juga merupakan potensi untuk dimanfaatkan untuk kelompok nelayan. Sehubungan dengan rencana MKP RI untuk memanfaatkan kapal/perahu perikanan rampasan untuk dihibahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan serta pemanfaatan oleh Satuan pendidikan Kelautan dan perikanan, telah dilaksanakan rapat koordinasi terkait pembahasan hibah kapal.

3. Penanganan Awak Kapal

Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan merupakan capaian perkembangan tahapan Penanganan dan Awak Kapal pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan penanganan awak kapal TPKP yang dimulai dari tahapan penerimaan awak kapal sampai dengan penyerahan ke instansi terkait sesuai dengan Keputusan Dirjen PSDKP Nomor : 70 /DJ-PSDKP/2014 perihal Petunjuk Teknis Penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan.

Pada tahun 2022 penyelesaian penanganan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan tercapai sebesar 99,01%. Nilai tersebut merupakan hasil rata-rata dari seluruh perkembangan penanganan awak kapal baik di pusat dan UPT. Tahapan penanganan awak kapal pelaku TPKP pada tahun 2022 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.9. Penanganan awak kapal TPKP berdasarkan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP

No	Unit Kerja	Jumlah Awak Kapal Yang Ditangani (Orang)	Persentase Perkembangan Kemajuan (%)
1	Pangkalan PSDKP Batam	95	98,33%

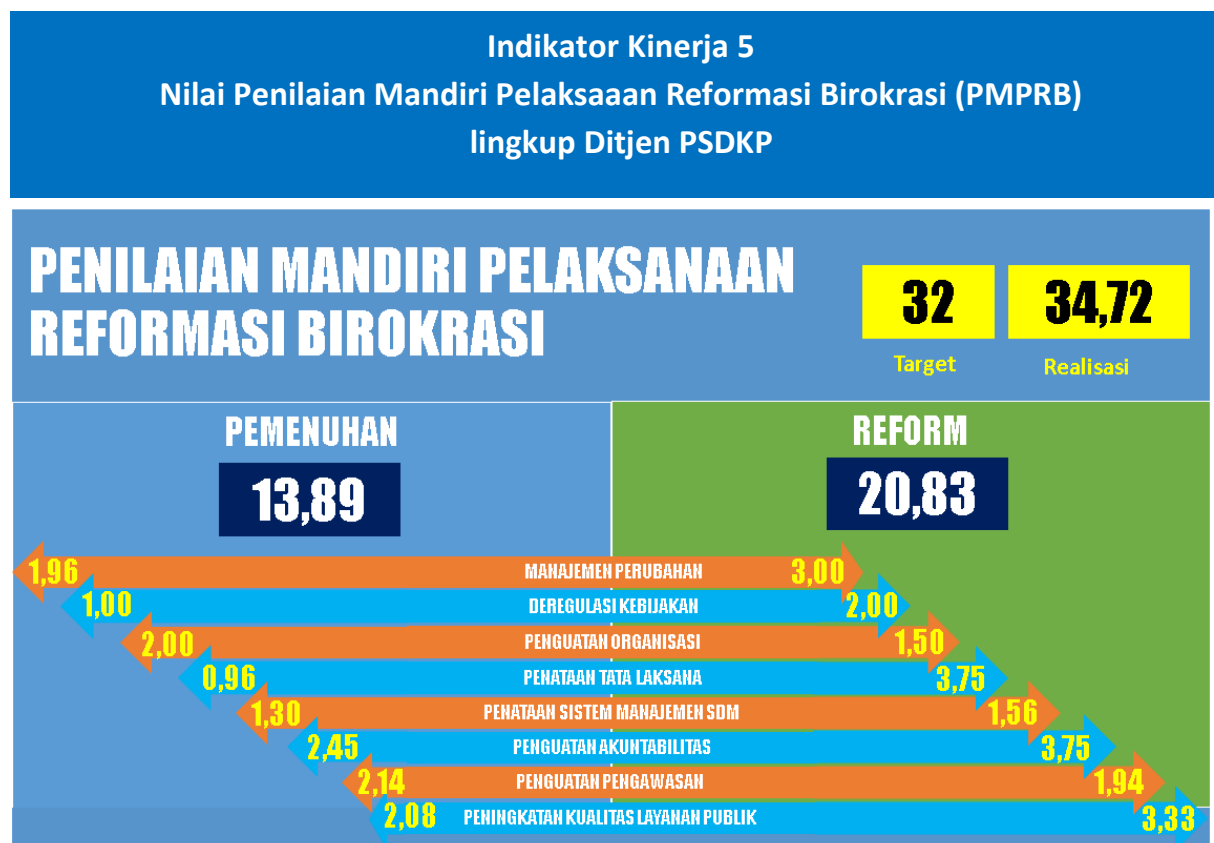
No	Unit Kerja	Jumlah Awak Kapal Yang Ditangani (Orang)	Persentase Perkembangan Kemajuan (%)
2	Pangkalan PSDKP Lampulo	54	100%
3	Pangkalan PSDKP Benoa	1	100%
4	Pangkalan PSDKP Bitung	34	100%
5	Pangkalan PSDKP Tual	41	100%
6	Stasiun PSDKP Belawan	78	100%
7	Stasiun PSDKP Pontianak	46	98,09%
8	Stasiun PSDKP Tahuna	5	97,50%
9	Stasiun PSDKP Tarakan	3	100%
10	Stasiun PSDKP Cilacap	3	66,67%
Jumlah dan rata-rata		360 ORANG	99,01%

Dibandingkan dengan periode tahun 2022, terjadi peningkatan sebesar 3,08% yang dipengaruhi oleh semakin meningkatnya kemampuan penanganan barang bukti disetiap unit pelaksana teknis. Juga didukung oleh supervisi penyidikan secara terus menerus yang dilaksanakan oleh tim pusat serta koordinasi yang baik dengan instansi terkait khusus Ditjen Imigrasi dalam setiap penanganan awak kapal. Kegiatan lain yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian kinerja tahun 2022, antara lain:

- Peningkatan kapasitas PPNS Sumber Daya Alam diselenggarakan oleh KPK yang bekerja sama dengan Yayasan Auriga Nusantara dengan jumlah peserta 65 orang PPNS lintas Kementerian/Lembaga dibidang Sumber Daya Alam – Lingkungan Hidup melalui koordinasi dan kolaborasi aparat penegak hukum di bidang SDA-LH melalui penyidikan bersama/multidoors;
- Pelatihan Tindak Pidana Pencucian Uang bidang Perikanan yang diselenggarakan oleh DISKUM TNI AL yang diikuti oleh 35 peserta dengan rincian peserta 30 orang berasal dari perwira TNI AL serta 5 orang dari KKP. Kegiatan ini bertujuan untuk upaya melengkapi kemampuan mengelola permasalahan – permasalahan di bidang perikanan yang mungkin timbul dalam melaksanakan tugas sesuai amanah dari Undang - Undang

SASARAN PROGRAM 5

TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK



Pengukuran penerapan Reformasi Birokrasi (RB) menggunakan indeks reformasi birokrasi melalui pelaksanaan *quality assurance* oleh Inspektorat Jenderal KKP selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada unit Eselon I KKP termasuk Ditjen. PSDKP. *Quality assurance* yang digunakan adalah dengan mengukur delapan kriteria yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor: 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Capaian PMPRB Ditjen PSDKP Tahun 2022 berdasarkan BA PMPRB nomor BAHK.PMPRB-01/ITJ/IV/2022 tanggal 26 April 2022 sebesar 34,72 dari target 32 dengan nilai aspek pemenuhan sebesar 13,89 dan aspek reform sebesar 20,83. Pada hasil penilaian reformasi birokrasi tahun 2021 – 2022, Ditjen PSDKP mengalami peningkatan nilai yang cukup signifikan pada area Penguatan Pengawasan. Pada area ini, implementasi yang dapat disampaikan adalah hasil penilaian SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) yang meningkat berdasarkan penilaian dari BPKP. Selain itu, terdapat juga peningkatan dari tindak lanjut pengaduan masyarakat yang memang cukup banyak di triwulan III dan IV tahun 2021. Kemudian implementasi lainnya yang mendukung pada area ini adalah capaian dari pelaksanaan pembangunan zona integritas yang mana pada tahun 2021 dari 4 (empat) unit kerja pelayanan di lingkup Ditjen. PSDKP seluruhnya mendapatkan predikat WBK oleh Tim

Penilai Internal (Inspektorat V).

Tabel 3.10.
Target dan Capaian IK Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
lingkup Ditjen PSDKP

Indikator Kinerja utama	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2024
	T	R	T	R	T	R	T
IK5. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Ditjen PSDKP	30	32,79	31	33,23	32	34,72	34

Selain peningkatan, penilaian reformasi birokrasi tahun 2021-2022 juga mengalami kendala penurunan terhadap penilaian pada area pelayanan publik yang mana mendapatkan nilai paling rendah diantara unit eselon I lain lingkup KKP. Adapun kendala dari pelaksanaan pelayanan public sebagai berikut:

- Data dukung yang kurang lengkap;
- Monitoring dan evaluasi yang belum dilakukan secara berkala;
- Laporan pengembangan system informasi terhadap teknologi informasi yang dibangun belum sesuai dengan pengembangan yang dicapai;
- Sosialisasi road map RB belum dilaksanakan karena masih menunggu penetapan terhadap rencana kerja pelaksanaan PMPRB;
- Monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi yg reguler dilaksanakan per triwulan masih tertunda pelaksanaannya karena masih identifikasi data dukung.

Terhadap kendala-kendala diatas, Ditjen. PSDKP berupaya dengan maksimal untuk melakukan perbaikan dengan rekomendasi berupa:

- Asistensi secara regular kepada unit kerja berkolaborasi dengan APIP untuk memantau pemenuhan dokumen dan implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- Menyusun rangka diagram dalam rangka pembangunan system informasi modern e-RB yang bertujuan mempermudah pelaksanaan penilaian reformasi birokrasi lingkup Ditjen. PSDKP yang didalamnya mencakup Penilaian Mandiri (Self Aassessment), Penyusunan Rencana Kerja Pelaksanaan RB, dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Rencana Kerja. Untuk lebih melihat hasil yang efektif dan efisien, penggunaan system ini dapat dilakukan dari mana saja yang memang pada saat dibutuhkan untuk pelaksanaan reformasi birokrasi.

Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2022 sebesar 86,09 yang merupakan nilai pengungkit 51,43 dan hasil 34,66. Nilai pengungkit KKP diperoleh dari 3 (tiga) subkomponen yaitu pemenuhan 18,60, Hasil anatar area perubahan 6,58 dan reform 26,26. Ditjen PDKP mendapat nilai 13,86 pada subkomponen pemenuhan sedangkan subkomponen Reform memperoleh nilai 20,83. Apabila dibandingkan dikedua subkomponen tersebut, kedepan perlu ditingkatkan.

Apabila dibandingkan dengan capaian eselon I lingkup KKP, Ditjen PSDKP menempati urutan pertama dari Sembilan Unit kerja eselon I. Perbandingan dengan capaian eselon I Lingkup KKP, sebagai berikut:

PENILAIAN	BOBOT	SETJEN	ITJEN	DJPT	DJPB	PSDKP	PDSPKP	PRL	BRSDM	BKIPM
PENGUNGKIT (36,30)										
I. PEMENUHAN (14,60)										
Manajemen Perubahan	2,00	1,60	2,00	1,50	1,89	1,96	1,93	1,72	1,91	1,65
Deregulasi Kebijakan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Penguatan Organisasi	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Penataan Tatalaksana	1,00	0,89	0,96	0,90	0,92	0,96	0,98	0,89	0,98	0,89
Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,25	1,40	1,30	1,32	1,30	1,21	1,14	1,17	1,37
Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,50	2,50	2,45	2,50	2,45	2,50	2,25	2,50	2,50
Penguatan Pengawasan	2,20	1,98	1,99	1,89	2,13	2,14	2,18	1,97	1,98	1,95
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,43	2,28	2,35	2,38	2,08	2,42	2,20	2,15	2,42
Total Pemenuhan	14,60	13,66	14,13	13,38	14,14	13,89	14,23	13,17	13,70	13,78
II. REFORM (21,70)										
Manajemen Perubahan	3,00	2,31	2,84	2,72	2,74	3,00	2,33	3,00	2,46	2,48
Deregulasi Kebijakan	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Penguatan Organisasi	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Penataan Tatalaksana	3,75	3,58	3,10	3,75	3,75	3,75	3,25	3,58	3,13	3,75
Penataan Sistem Manajemen SDM	2,00	1,63	1,50	2,00	1,50	1,56	1,72	1,46	1,88	1,50
Penguatan Akuntabilitas	3,75	3,15	3,40	3,42	3,34	3,75	3,53	3,73	3,33	3,33
Penguatan Pengawasan	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,94	1,95	1,95	1,94	1,95
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	3,75	3,75	3,03	3,13	3,33	3,75	3,21	3,75	3,47
Total Reform	21,70	19,87	20,04	20,36	19,90	20,83	20,03	20,44	19,99	19,98
Total (Pemenuhan+Reform)	36,30	33,52	34,17	33,74	34,03	34,72	34,25	33,61	33,65	33,76

Indikator Kinerja 6

Indeks Kepuasan Masyarakat Penggunaan layanan Publik Ditjen PSDKP

Layanan publik di lingkup Ditjen PSDKP yang dilakukan meliputi layanan penerbitan Surat Laik Operasi (SLO), layanan penerbitan Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan (LVHPI), layanan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) yang terdiri dari produk layanan ¹⁾ registrasi transmitter SPKP, ²⁾ pemantauan pergerakan kapal perikanan berupa informasi *plotting* dan *tracking* serta ³⁾ pemberian akses pemantauan kapal perikanan. Survei atas penggunaan layanan publik dilakukan sebagai salah satu upaya perbaikan layanan yang diberikan oleh Ditjen PSDKP secara berkala dimana hasilnya digunakan sebagai bahan tidak lanjut perbaikan

kualitas layanan publik kepada pengguna jasa. Survei dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Publik lingkup Ditjen PSDKP yaitu Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dan empat belas Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen PSDKP setiap triwulan. Realisasi indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan publik Ditjen PSDKP sebesar 91,40. Berikut adalah perbandingan capaian tahun tahun sebelumnya dan target 2024 disajikan pada tabel 3.11.

Tabel 3.11. Capaian indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan publik

Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2024
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T
IK6 Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Ditjen. PSDKP	80	88,92	111,15	80	90,88	113,6	80	91,40	114,25	80

Capaian tahun 2022 sebesar 91,40 diperoleh dari rata-rata capaian triwulan I sampai dengan IV dimana pencapaian setiap triwulannya diperoleh dari rata-rata layanan yang dilakukan dilingkup Ditjen PSDKP. Realisasi indikator kinerja, sebagai berikut:

No	Layanan	TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT)	92,70	92,99	93,05	93,10
2	Pemberian Akses Pemantauan Perikanan	94,21	92,99	93,16	93,21
3	Pelayanan Analisis Pergerakan Kapal Perikanan	89,99	90,05	88,99	89,05
4	Pelayanan SLO	89,83	89,91	90,33	90,31
5	Pelayanan LVHPI	89,49	90,78	91,41	92,51
		91,24	91,34	91,39	91,64

Kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun 2022 antara lain koordinasi secara berkala dalam rangka monitoring pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dengan 14 UPT Pengawasan, juga mempertahankan pelayanan kepada para nelayan dan stakeholder. Hal tersebut, dilaksanakan untuk memastikan indikator kinerja dapat tercapai sesuai dengan target.

Indikator Kinerja 7

Indeks Efektivitas Kebijakan Pemerintah Bidang Pengawasan SDKP

Kebijakan terkait pengawasan SDKP lingkup Ditjen PSDKP disusun melalui beberapa tahapan mulai dari perencanaan yang terdiri dari penyusunan agenda dan formulasi kebijakan hingga tahap pelaksanaan berupa implementasi kebijakan dan monev kebijakan. Kebijakan lingkup Ditjen PSDKP yang diukur efektivitas kualitasnya adalah kebijakan setingkat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan terdapat dalam Prognosa penyusunan Peraturan Perundang-Undangan lingkup KKP. Dari target ditetapkan sebesar 70 indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP terealisasi sebesar 77,56 dengan capaian 110,80%.

Tabel 3.12. capaian indikator kinerja indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP tahun 2022

Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2024
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	Target
IK 7. Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP	-	-	-	70	74,8	106,86	70	77,56	110,80	-

Realisasi sebesar 77,6 diperoleh dari perhitungan indeks efektifitas kebijakan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya indeks efektivitas kebijakan tahun 2022 mengalami kenaikan. Namun tidak bisa dibandingkan dengan target renstra 2024 karena belum dimasukan dalam renstra 2020-2024.

Peraturan perundang-undangan yang dikaji merupakan salah satu peraturan Menteri KP yang tercantum pada Kepmen Kelautan dan Perikanan Nomor 25 tahun 2021 tentang Program Penyusunan (Prosun) Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan KKP tahun 2021 yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dimaksud merupakan salah satu amanat dari PP Nomor 27 tahun 2021, PP Nomor 21 tahun 2021 dan PP Nomor 5 tahun 2021, dan merupakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang baru sebagai wujud implementasi asas *Ultimum Remedium* sebagaimana asas yang dikedepankan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Dari hasil penilaian yang dilakukan, dapat diidentifikasi kebijakan yang dikaji telah sesuai dengan tahapan-tahapan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan Nomor 62 Tahun 2020, dan tujuan jangka menengah instansi, disamping itu juga tidak adanya duplikasi dengan kebijakan lain. Namun demikian, setelah dilakukan monitoring dan evaluasi kebijakan yang diimplementasikan masih terdapat beberapa hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dimaksud, dan masih perlu dilakukan sosialisasi atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut pada stakeholder, mengingat Peraturan Menteri tersebut merupakan hal yang baru ditetapkan dan diterapkan. Saran yang dapat disampaikan untuk periode selanjutnya agar dapat dilakukan sosialisasi lebih intensif, sehingga diharapkan para stakeholder dapat memahami secara jelas atas peraturan tersebut, dan dapat diketahui permasalahan-permasalahan dalam implementasi kebijakan di lapangan walaupun dalam proses penyusunannya telah dilakukan konsultasi publik.

Indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan unit kerja selevel di lingkup Kementerian kelautan dan Perikanan, karena yang mempunyai Indikator kinerja ini hanya Ditjen PSDKP.

Indikator Kinerja 8
Unit kerja yang berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
lingkup Ditjen PSDKP

UNIT KERJA YANG BERPREDIKAT MENUJU WBK

120%

10

12

Target Realisasi

Pangkalan PSDKP Bitung	Pangkalan PSDKP Jakarta Pangkalan PSDKP Benoa	Pangkalan PSDKP Batam Pangkalan PSDKP Tual	Pangkalan PSDKP Lampulo Stasiun PSDKP Cilacap Stasiun PSDKP Belawan Stasiun PSDKP Pontianak	Stasiun PSDKP Tarakan Stasiun PSDKP Tahuna Stasiun PSDKP Kupang
TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022

Ditjen PSDKP telah mencanangkan seluruh unit kerja yang memiliki fasilitas pelayanan publik akan berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Sampai dengan tahun 2022 telah ditargetkan unit kerja dengan predikat WBK sebanyak 10 (sepuluh) unit kerja, yang merupakan akumulasi dari tahun 2018. Khusus tahun 2022, ditargetkan 2 unit kerja yang bepredikat WBK dan telah tercapai melebihi target. Adapun dengan rinciannya sebagai berikut:

- a. Tahun 2018 telah diusulkan ¹⁾ Pangkalan PSDKP Bitung untuk mendapatkan predikat menuju WBK dengan nilai total 76,79 dan telah dievaluasi kembali predikat tersebut setelah kurun waktu lebih dua tahun pada 2021 dengan hasil penilaian mencapai 80,92;
- b. Tahun 2019 telah diusulkan ²⁾ Pangkalan PSDKP Jakarta dan ³⁾ Pangkalan PSDKP Benoa untuk mendapatkan predikat menuju WBK dengan nilai 82,74 untuk Pangkalan PSDKP Jakarta dan 82,88 untuk Pangkalan PSDKP Benoa;
- c. Tahun 2020 telah diusulkan ⁴⁾ Pangkalan PSDKP Batam dan ⁵⁾ Pangkalan PSDKP Tual untuk mendapatkan predikat menuju WBK dengan nilai 87,27 untuk Pangkalan PSDKP Batam dan 87,29 untuk Pangkalan PSDKP Tual. Kedua unit kerja tersebut bersama dengan Pangkalan PSDKP Jakarta dan Pangkalan PSDKP Benoa diusulkan untuk penilaian oleh Tim Penilaian Nasional (TPN) Kemenpan RB pada 2021 namun Pangkalan PSDKP Tual belum bisa lolos penilaian dan belum mendapatkan predikat menuju WBK dari TPN;
- d. Tahun 2021 telah diusulkan ⁶⁾ Pangkalan PSDKP Lampulo, ⁷⁾ Stasiun PSDKP Belawan, ⁸⁾ Stasiun PSDKP Cilacap dan ⁹⁾ Stasiun PSDKP Pontianak untuk mendapatkan predikat menuju WBK dengan nilai 80,88 untuk Pangkalan PSDKP Lampulo, 78,98 untuk Stasiun PSDKP Belawan, 78,56 untuk Stasiun PSDKP Cilacap dan stasiun PSDKP Pontianak 80,78.

- e. Tahun 2022 telah diusulkan ¹⁰⁾Stasiun PSDKP Tarakan, ¹¹⁾ Stasiun PSDKP Tahuna dan ¹²⁾ Stasiun PSDKP Kupang untuk mendapatkan predikat menuju WBK dengan nilai 88,42 untuk Stasiun PSDKP Tarakan; 89,91 untuk Stasiun PSDKP Tahuna dan 89,32 untuk Stasiun PSDKP Kupang.

Sebagai upaya mempertahankan capaian kinerja dan meningkatkan pembangunan WBK khususnya pada komponen pengungkit area penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, manajemen perubahan yaitu meningkatkan komitmen bersama antara pemimpin unit kerja dan seluruh jajarannya untuk mewujudkan zona integritas tidak hanya dari segi pemenuhan administratif tetapi betul betul diimplementasikan secara nyata.

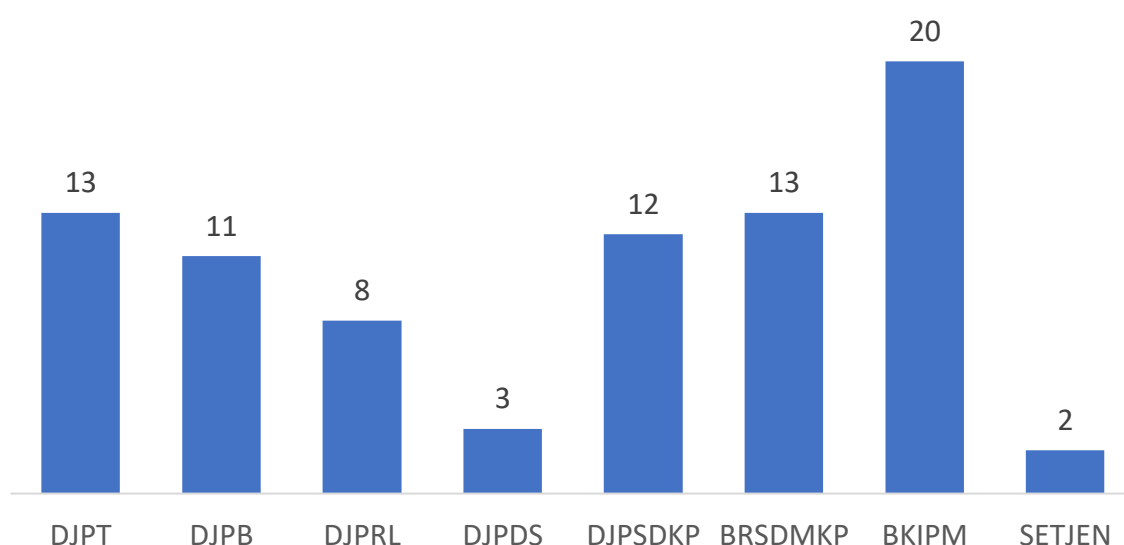
Kegiatan utama yang mendorong pencapaian kinerja ini meliputi pembentukan tim pembangunan Zona Integritas pada unit kerja yang akan diusulkan wilayah bebas dari korupsi, pendampingan secara terus menerus sepanjang tahun dengan supervisi langsung Inspektorat Jenderal KKP, dan Penetapan tim pembina dilingkup satker pusat.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya dan target tahun 2024 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.13. Capaian indikator kinerja Unit kerja yang berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Ditjen PSDKP tahun 2022

Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2024
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	Target
IK 8. Unit kerja yang berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi lingkup Ditjen PSDKP	4	5	120	8	8	100	10	12	120	8

Sementara itu, apabila dibandingkan dengan capaian kinerja eselon I lingkup KKP, sebagai berikut:



Indikator Kinerja 9

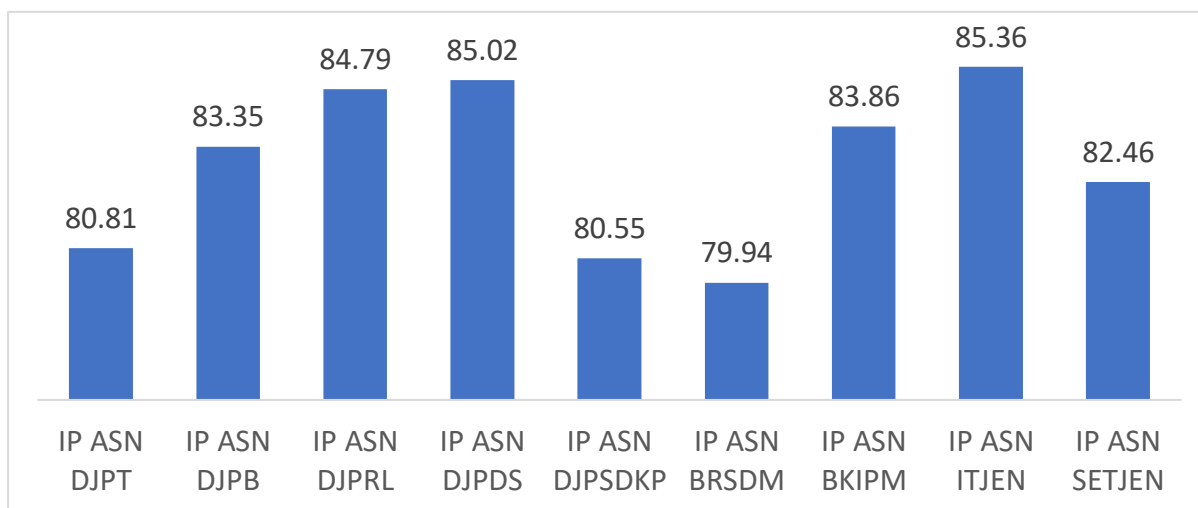
Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen PSDKP

Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PSDKP merupakan upaya mengukur kualifikasi ASN Ditjen PSDKP pada periode 2022 berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, profesionalitas dan disiplin pegawai. Nilai capaian Tahun 2022 sebesar 80,55 dari target yang ditetapkan sebesar 77 dengan kategori sedang sehingga tingkat capaian sebesar 104,61%. Nilai tersebut diperoleh dari 4 (empat) komponen utama yaitu: 1)kualifikasi sebesar 13,06; 2)Kompetensi sebesar 37,62;3)Kinerja sebesar 24,91;4)disiplin sebesar 4,96; Perbandingan capaian dengan tahun-tahun sebelumnya dan target tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 3.14. Capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen PSDKP

Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2024
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	Target
IK 9. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen PSDKP	72	74,39	103,32	73	77,91	106,72	77	80,55	104,61	76

Jika dibandingkan dengan tahun 2021 maka ada peningkatan nilai IP ASN sebesar 2,64. Peningkatan terjadi pada komponen kualifikasi sebesar 0,11 dari tahun 2021 (12,95) dan kompetensi sebesar 2,61 dari nilai 2021 (35,01) yang dipengaruhi semakin banyaknya pegawai yang berpartisipasi pada kegiatan seminar/workshop/diklat. Capaian tahun 2022 juga dapat melampaui target IP ASN pada akhir renstra sebesar 76. Apabila dibandingkan dengan unit eselon I lingkup KKP, sebagai berikut:

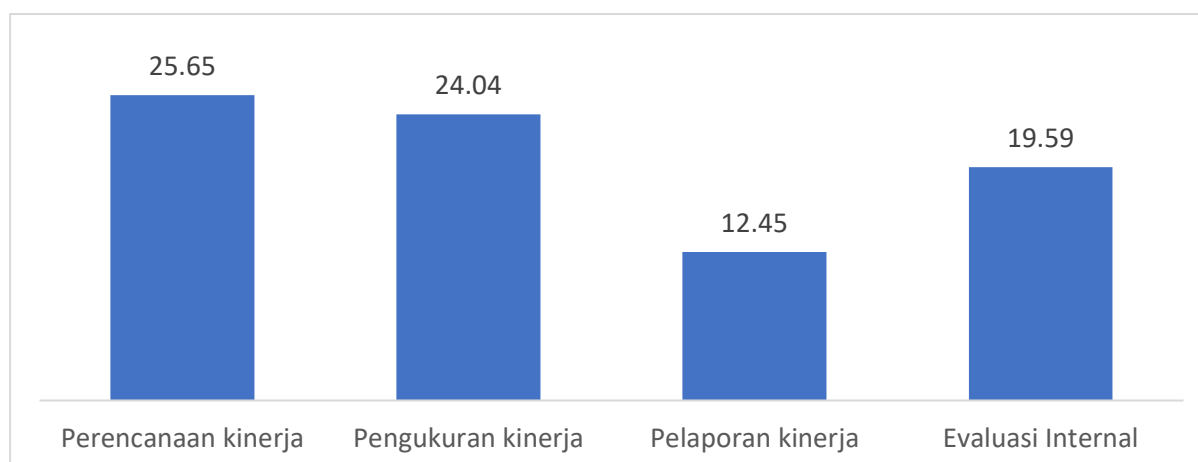


Indikator Kinerja 10

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PSDKP

Pencapaian nilai PM SAKIP Ditjen. PSDKP Tahun 2022 sebesar 81,73 dengan kategori penilaian A, dan interpretasi “memuaskan”, yaitu: akuntabilitas kinerja baik, kinerja baik, sistem manajemen kinerja baik, menggunakan *knowledge* manajemen untuk membangun budaya

kerja, banyak inovasi. Nilai tersebut diperoleh dari hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP selaku aparaturngawas internal KKP melalui surat nomor: R.161/ITJ/HP.440/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022. Penilaian dilakukan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Capaian tahun 2022 sebagiamna disajikan padagrafik berikut:



Perbandingan target dan capaian Nilai Implementasi SAKIP Ditjen PSDKP sebagai berikut:

Tabel 3.14. Perbandingan Capaian indikator kinerja Nilai SAKIP Ditjen PSDKP

Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2024
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	Target
IK 10. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PSDKP	87	88,86	102,14	87,15	87,64	100,56	80,01	81,73	102,15	87,75

Capaian tahun 2022 menurun dari capaian tahun 2021 sebesar 5,91% yang disebabkan menurunnya nilai komponen perencanaan kinerja terkait dengan perencanaan kinerja yang telah dimanfaatkan secara berkesinambungan. Nilai diatas juga dipengaruhi oleh nilai dari seluruh unit kerja eselon II lingkup Ditjen PSDKP. Namun secara umum penurunan nilai disebabkan karena adanya peraturan baru Menteri PAN RB nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai upaya perbaikan kedepan diperlukan langkah-langkah khusus untuk mempertahankan komponen yang sudah mencapai target dan meningkatkan komponen yang rendah melalui peningkatan koordinasi tim kinerja Ditjen PSDKP.

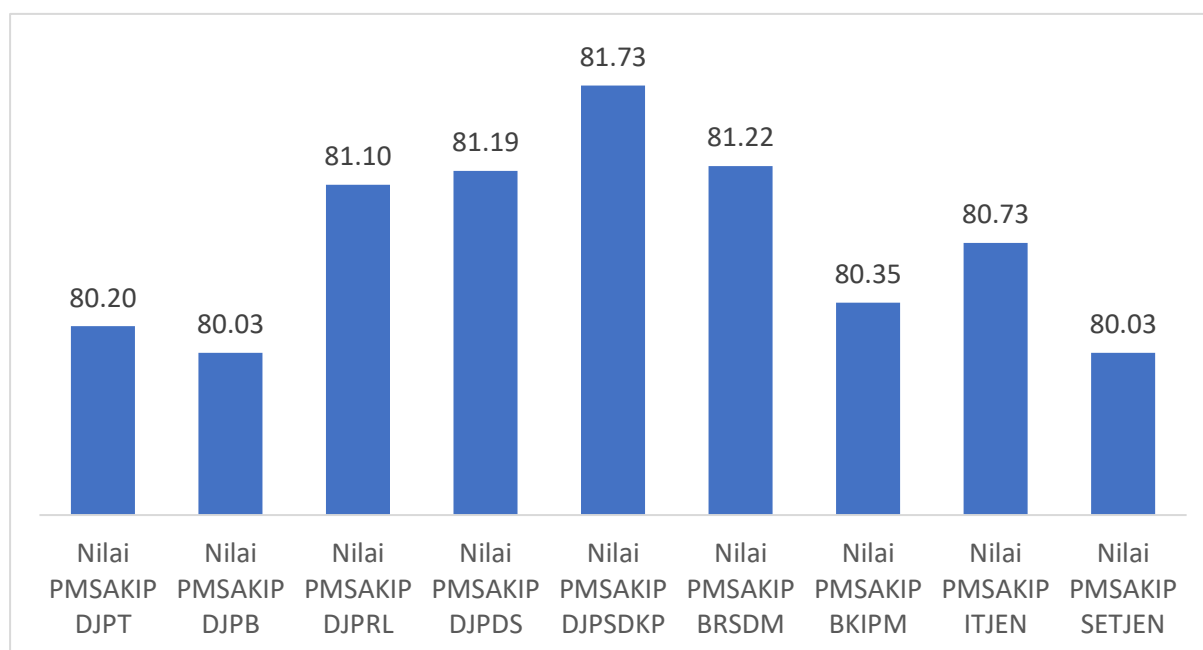
Pencapaian kinerja Tahun 2022 diupayakan melalui penyusunan perencanaan kinerja yang lengkap dan baik antara lain rencana strategis Ditjen PSDKP Tahun 2020-2024, dialog kinerja yang dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal PSDKP rencana kerja 2022, perjanjian kinerja 2022, manual IKU, pohon IKU, matriks cascading dari level 1 hingga ke level terbawah.

Selanjutnya sebagai upaya mengawal terjaminnya pelaksanaan kinerja yang sudah disusun dan ditargetkan, maka dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. hal tersebut sangat penting untuk mengetahui sejauh mana progres pencapaian kinerja serta dapat

mengidentifikasi secara dini kendala dan permasalahan yang terjadi. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tersebut, dirumuskan rekomendasi perbaikan agar target dapat dicapai pada akhir periode. Kegiatan yang terkait termasuk pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja yang dilaksanakan secara rutin.

Peningkatan kualitas SDM pengelola kinerja diupayakan melalui kegiatan Bimbingan Teknis pengelolaan kinerja dan Workshop SAKIP. Hal yang paling mempengaruhi pengelolaan kinerja Ditjen PSDKP adalah komitmen pimpinan dalam hal ini Direktur Jenderal PSDKP secara rutin memantau bahkan memimpin langsung pengelolaan Kinerja Ditjen PSDKP.

Kedepan sebagai upaya mempertahankan serta meningkatkan nilai implementasi SAKIP Ditjen PSDKP maka diperlukan konsistensi penyelenggaraan SAKIP pada semua komponen diseluruh unit kerja hingga ke individu pegawai Ditjen PSDKP. Apabila dibandingkan dengan unit eselon I lingkup KKP, Ditjen PSDKP mendapatkan peringkat pertama, sebagaimana disajikan pada grafik berikut:



Indikator Kinerja 11

Unit yang menerapkan inovasi pelayanan Publik



Ide/kreasi/adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Terkait unit kerja yang menerapkan inovasi pelayanan publik, salah satu syarat inovasi yang diusulkan adalah sudah diimplementasikan selama minimal satu tahun. Tahun 2022, Ditjen PSDKP telah mengajukan 2 inovasi untuk dilakukan penilaian yaitu Sistem Aktivasi dan Monitor Transmitter SPKP secara Online (SALMON) dan Sarana Interaksi Pengawas Perikanan (SIPEPI).

SALMON mengintegrasikan seluruh aplikasi SPKP yang terdiri dari 1) fitur aktivasi, 2) lacak kapal, 3) monitor, 4) sebaran kapal dan 5) kontak. Pengguna SPKP dapat mengakses SALMON melalui laman spkp.kkp.go.id dengan menerapkan sistem layanan satu atap atau *one stop service* secara online dengan waktu proses 40 menit dan produk pelayanann yang diterbitkan dalam bentuk dokumen digital yang dikirim melalui surel. Aplikasi SALMON dapat diunduh dari playstore dengan nama SALMON *Track Mobile*. Evaluasi secara internal oleh UPP dan eksternal oleh Lembaga Administrasi Negara dan Kementerian PAN dan RB dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui SALMON.

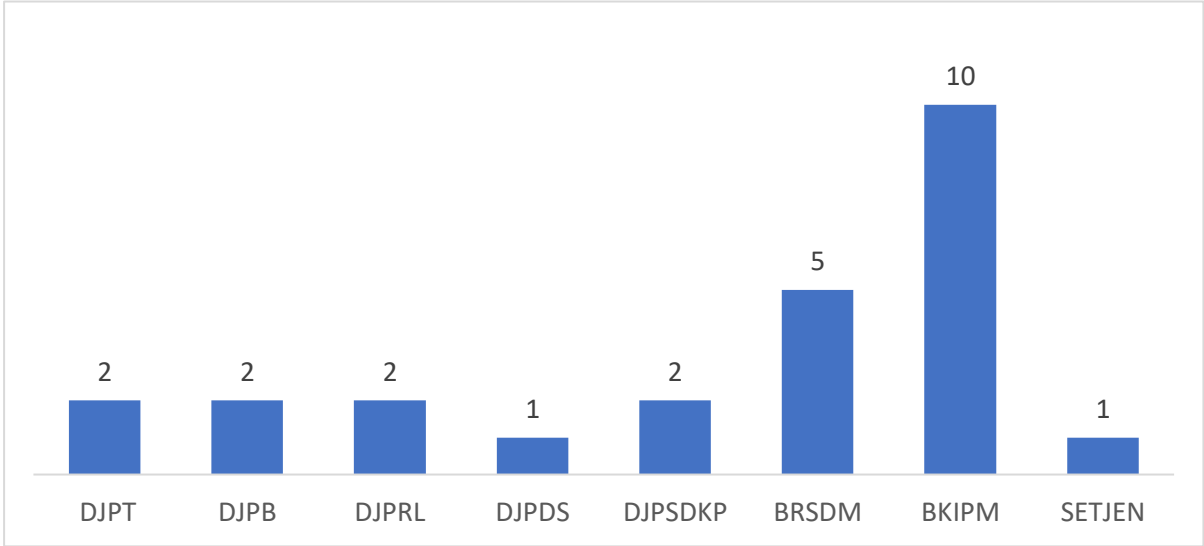
Melalui aplikasi SIPEPI, Ditjen PSDKP khususnya di Pangkalan PSDKP Jakarta berupaya memberikan layanan penerbitan SLO kapal perikanan di masa pandemik Covid-19 dengan akses yang lebih mudah, lebih cepat, mengurangi tatap muka, dan tentunya lebih aman bagi pengguna jasa. Tata cara menggunakan SIPEPI adalah pengguna jasa menginput pesan melalui WhatsApp ke nomor WhatsApp SIPEPI. Data yang diinput meliputi data identitas kapal, perizinan kapal, foto kapal, foto alat tangkap, dan foto nomor dan merk mesin kapal. Durasi waktu pelayanan dihitung melalui SOP pelayanan SLO, observasi, kartu kendali pelayanan sebelum dan setelah implementasi SIPEPI. Waktu SOP pelayanan SLO (sebelum implementasi SIPEPI) adalah 60 menit dengan waktu interaksi 40 menit, sedangkan setelah

adanya SIPEPI waktu layanan menjadi 20 menit dan waktu interaksi hanya 5 menit. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya dan target renstra tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 3.15. Perbandingan Capaian indikator kinerja Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik

Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2024
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	Target
IK 11. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik	1	2	120	1	1	100	1	2	120	1

Ditjen PSDKP secara konsisten setiap tahunnya mengajukan inovasi layanan untuk mempermudah pemberian layanan kepada masyarakat. Apabila dibandingkan dengan eselon I lingkup KKP, sebagai berikut:



Indikator Kinerja 12

Batas Tertinggi persentase Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen PSDKP

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pmeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Ditjen PSDKP tahun 2020 didasarkan pada empat kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, tidak terdapat temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Ditjen PSDKP Tahun 2021. Perbandingan sebagaimana yang disajikan pada tabel 3.16.

Tabel 3.16.

Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen PSDKP

Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2024
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	Target
IK 12. Batas Tertinggi persentase Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Ditjen PSDKP	<1	0,01	120	<1	0	120	<1	0	120	<1

Ket=Target, R=Realisasi

Upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan yaitu monitoring reguler atas pengelolaan anggaran minimal setiap triwulan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kegiatan dan anggaran lingkup Ditjen PSDKP triwulan I, semester I, triwulan III dan tahun 2022 baik pada unit kerja Ditjen PSDKP Pusat maupun Dekonsentrasi.

Apabila dibandingkan dengan unit eselon I lingkup KKP, sebagaimana disajikan pada tabel berikut

No	Unit Kerja	Realisasi Anggaran (Rp)	Nilai Temuan BPK (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1	Setjen	383,839,736,923	0	≤1	0,00	200.00
2	Itjen	66,603,283,558	0	≤1	0,00	200,00
3	Ditjen Perikanan Tangkap	530,205,280,891	52,788,803	≤1	0.0001	199.99
4	Ditjen Perikanan Budidaya	770,757,750,701	375,645,320	≤1	0.0005	199.95
5	Ditjen PSDKP	732,354,950,588	0	≤1	0,00	200.00
6	Ditjen PDSPKP	188,272,958,214	0	≤1	0,00	200.00
7	Ditjen PRL	288,619,401,230	102,009,671	≤1	0.0004	199.96
8	BRSDMKP	1,284,215,841,143	101,383,061	≤1	0.0001	199.99
9	BKIPM	475,613,179,712	0	≤1	0,00	200.00
TOTAL		4,720,482,382,960	631,826,855	≤1	0.0001	199.99

Indikator Kinerja 13 Level Maturitas SPIP Lingkup Ditjen PSDKP

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan Ditjen PSDKP. Penilaian untuk Ditjen PSDKP dengan mengadopsi nilai SPIP lingkup KKP yang telah dilakukan oleh Tim Asesor KKP dalam hal ini Inspektorat Jenderal KKP. Hasil penilaian tingkat maturitas SPIP berada pada level terdefinisi

atau tingkat 3 dari 5 tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar 3,874 sebagaimana tersaji pada tabel 3.17.

Tabel 3.17. Level maturitas SPIP lingkup Ditjen PSDKP

Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2024
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	Target
IK 13. Level Maturitas SPIP Lingkup Ditjen PSDKP	3	4	120	3	3	100	3	3	100	3

Ket=Target, R=Realisasi

Nilai maturitas SPIP lingkup Ditjen PSDKP tahun 2021 sebesar 3,874 sedangkan di tahun 2022 sebesar 3,807 maka terjadi penurunan nilai maturitas SPIP sebesar 0,5. Namun demikian, level maturitas SPIP tahun 2021 dan tahun 2021 sama yaitu level 3, merupakan adaptasi nilai maturitas SPIP lingkup KKP sebagaimana Nota Dinas Kepala Biro Keuangan Nomor 2012/SJ.2/KU.130/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022. Nilai tersebut berlaku untuk semua eselon I lingkup KKP.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan level maturitas SPIP diantaranya dengan ¹⁾ meningkatkan kualitas indikator sasaran program menjadi seluruhnya berorientasi hasil (outcome) ²⁾ meningkatkan kualitas pengendalian resiko atas seluruh kegiatan operasional unit kerja dan resiko strategis unit eselon I ³⁾ meningkatkan kualitas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP.

Indikator Kinerja 14 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PSDKP

Tingkat kepatuhan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup Ditjen PSDKP tahun 2022 dilihat berdasarkan ¹⁾ pengelolaan rencana kebutuhan BMN tahun 2021, ²⁾ ketersediaan usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan I tahun 2022 ke pengguna barang maupun pengelola barang, ³⁾ penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) tahun 2017-2019, ⁴⁾ pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2021 didukung BAST/Berita Acara pemakaian dan ⁵⁾ Penyusunan Laporan BMN yang tepat waktu. Penghitungan tingkat kepatuhan pengelolaan BMN menggunakan Lembar Kerja Penilaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN. Realisasi tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2022 tersaji pada tabel 3.17.

Tabel 3.18.

Hasil penilaian tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Ditjen PSDKP tahun 2022

Komponen Kepatuhan BMN	Bobot	Nilai
Pemanfaatan RK BMN tahun 2021	12,5	12,5
Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST s.d triwulan I tahun 2021 baik ke pengguna barang dan pengelola barang	25	25

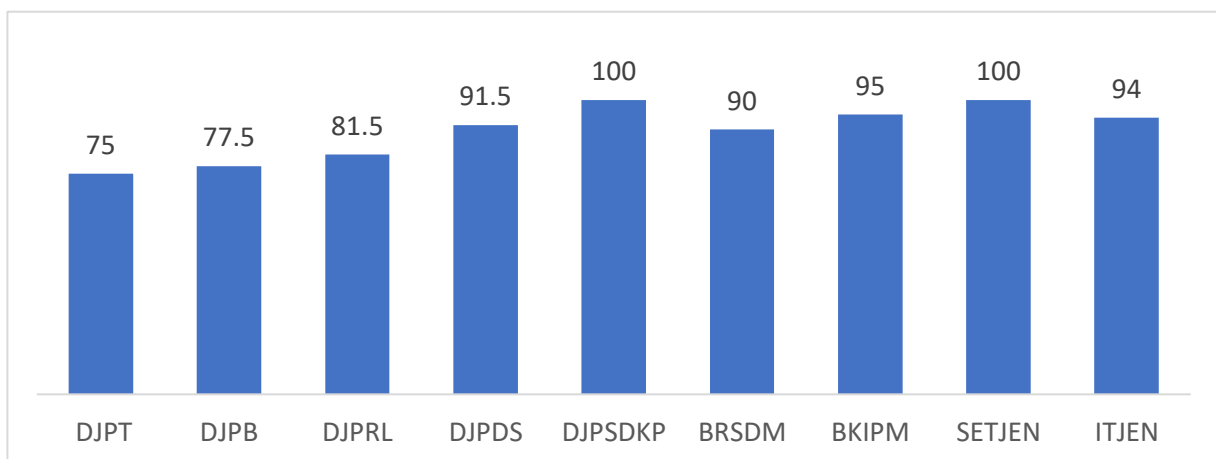
Komponen Kepatuhan BMN	Bobot	Nilai
Tingkat penyelesaian perbaikan inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) periode tahun 2017-2018	25	25
Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2021 di dukung BAST/Berita Acara Pemakaian	25	25
Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu	12,5	12,5
	Σ	100

Perbandingan capaian dengan tahun-tahun sebelumnya serta target renstra 2024, sebagai berikut:

Tabel 3.19. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Ditjen PSDKP tahun 2022

Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2024
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	Target
IK 14 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PSDKP	-	-	-	72,5	100	120	75	100	100	-

Dengan target 75 realisasi tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Ditjen PSDKP tahun 2022 sebesar 100 dengan tingkat capaian sebesar 120%. Ditjen PSDKP dengan nilai maksimal 100% untuk pengelolaan BMN bersama dua unit kerja lainnya yaitu Sekretariat Jenderal KKP untuk pengelolaan BMN memberikan langkah awal yang baik untuk pengelolaan BMN Ditjen PSDKP bahwa implementasi pengelolaan BMN yang sudah tertib supaya dapat dipertahankan pada periode selanjutnya. Apabila dibandingkan dengan unit eselon I lingkup KKP, sebagaimana disajikan pada grafik berikut:



Indikator Kinerja 15 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen PSDKP

Tingkat kepatuhan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) lingkup Ditjen PSDKP tahun 2022 dilihat berdasarkan ¹⁾ ketersediaan manajemen resiko pengadaan barang jasa strategis

lingkup Ditjen PSDKP ²⁾ perencanaan dan persiapan pengadaan ³⁾ presentase pemilihan penyedia barang/Jasa yang dilaksanakan melalui SPSE ⁴⁾ kesesuaian tahap pelaksanaan ⁵⁾ Laporan penyelenggaraan PBJ ⁶⁾ persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen PSDKP. Penghitungan tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa menggunakan Lembar Kerja Penilaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan PBJ. Capaian tahun 2022 sebesar 90,58 dari target 75 atau persen capaian 120%.

Tabel 3.20.

Penilaian kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen PSDKP tahun 2022

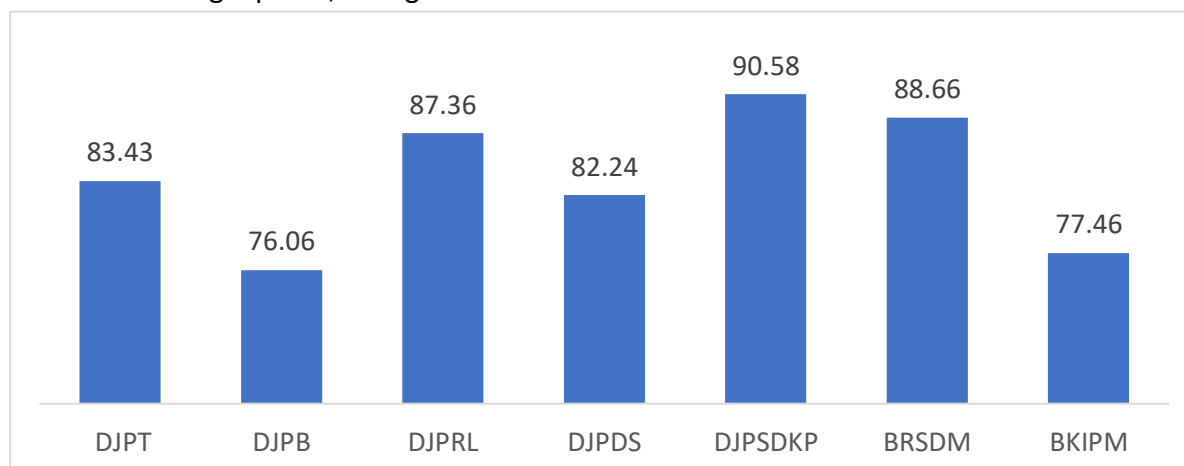
Komponen Kepatuhan PBJ	Bobot	Nilai
Ketersediaan manajemen resiko pengadaan barang jasa strategis lingkup Ditjen PSDKP	10	10
Perencanaan dan persiapan pengadaan	15	12,1
Presentase pemilihan penyedia barang/Jasa yang dilaksanakan melalui SPSE	10	10
Kesesuaian tahap pelaksanaan	45	38,48
Laporan penyelenggaraan PBJ	5	5
persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen PSDKP triwulan I s.d triwulan III tahun 2022	15	15
	Σ	90,58

Perbandingan capaian dengan tahun tahun sebelumnya dan target renstra disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.21. Tingkat kepatuhan Pengadaan PBJ lingkup Ditjen PSDKP tahun 2022

Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2024
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	Target
IK 15 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen PSDKP	-	-	-	72,5	83,85	115	75	90,58	120	-

Upaya yang sudah dilakukan untuk tepat dalam pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen PSDKP diantaranya koordinasi lingkup Ditjen PSDKP dalam rangka inventarisasi pengadaan barang dan Jasa 2022, penginputan data kedalam aplikasi SIRUP, pemantauan progres pengadaan barang/jasa secara reguler menggunakan kertas kerja pemantauan. Perbandingan dengan unit eselon I lingkup KKP, sebagai berikut.



Indikator Kinerja 16

Persentase Unit Kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar

Capaian IKU “Persentase Unit Kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar” sebesar 95,10% yang diperoleh dari 3 komponen yaitu pemenuhan dokumen, keikutsertaan dan keaktifan dengan metode perhitungan menggunakan aplikasi bitrix24, yang merupakan aplikasi untuk mengukur MP yang mudah diterapkan, yakni dengan prinsip melihat seberapa banyak pegawai di lingkungan KKP yang menyampaikan dan menerima informasi kegiatan. Perbandingan capaian dan target disajikan pada tabel dibawah:

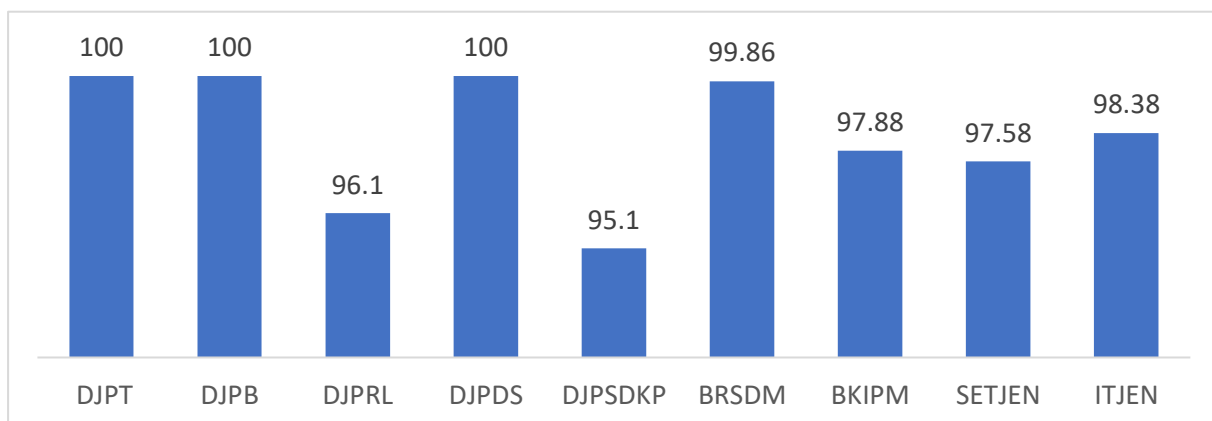
Tabel 3.22.

Perbandingan Target dan Capaian IK “Persentase Unit Kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar

Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2024
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	Target
IK 16 Persentase Unit Kerja Ditjen PSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan terstandar	82%	98%	119,51	84%	99,21%	118,11	86	95,10	110,58	90%

Ket: T=Target, R=Realisasi

Tingginya capaian kinerja pada Tahun 2022, menunjukkan tingginya partisipasi pegawai Ditjen PSDKP untuk berbagi pengetahuan tentang kegiatan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dilaksanakan. Namun, apabila dibandingkan dengan priode tahun 2021, mengalami penurunan sebesar 4,11%, yang disebabkan tidak tercapainya keaktifan beberapa pegawai khususnya yang diberikan tugas tambahan sebagai subkoordinator dan koordinator. Sebagai upaya perbaikan kedepan perlu dilakukan sosialisasi dan pengingat secara berkala kepada pegawai Ditjen PSDKP yang sudah memiliki akun bitriks untuk secara proaktif melakukan posting kegiatan. Apabila dibandingkan dengan Eselon I lingkup KKP, seperti disajikan pada grafik dibawah ini.



Indikator Kinerja 17

Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PSDKP

Capaian jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen. PSDKP berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang diterbitkan pada 1 Oktober 2021 s/d 30 September 2022. LHP yang diperhitungkan terbatas pada LHP audit, reviu dan evaluasi dalam bentuk surat dan bab dari Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti (proses dan/atau tuntas). Hingga 30 September 2022 dari 224 rekomendasi telah ditindak lanjuti hingga tuntas sebanyak 22 rekomendasi atau sekitar 99,11% dan menyisakan 2 rekomendasi dalam proses. Perbandingan capaian dengan tahun-tahun sebelumnya dan target renstra 2024, sebagai berikut:

Tabel 3.23.

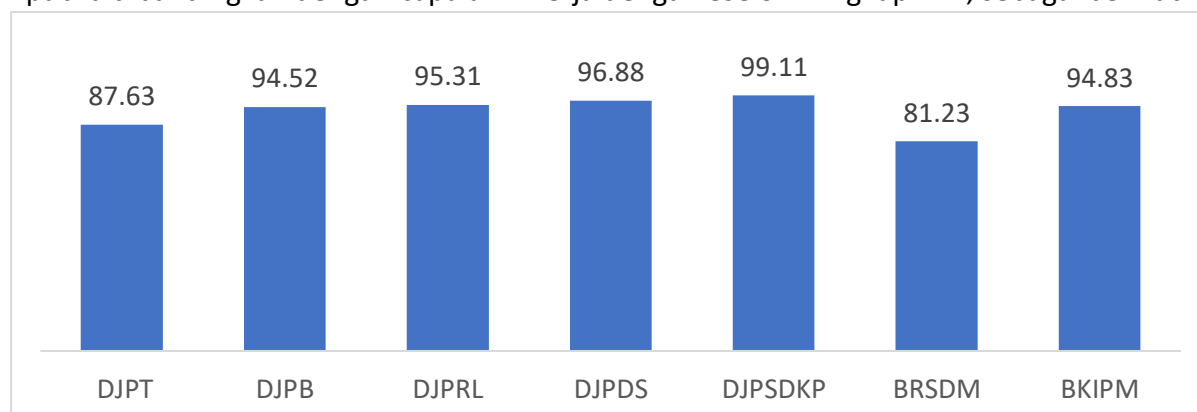
Perbandingan Target dan Capaian IK Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PSDKP”

Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2024
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	Target
IK 17. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PSDKP	60%	74%	120	65%	89,16%	120	70%	99,11%	120	90%

Ket: T=Target, R=Realisasi

Capaian Tahun 2022 meningkat sebesar 9,95% dari capaian tahun 2021, menunjukkan tingginya komitmen Ditjen PSDKP untuk menyelesaikan setiap rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektorat Jenderal KKP. Rekomendasi yang terbit dan tindak lanjut yang cepat dan tepat merupakan bentuk pengendalian yang diimplementasikan dengan tepat demi kinerja pengawasan SDKP yang lebih baik. Pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2022 yang berkontribusi terhadap pencapaian IK ini adalah 1) koordinasi rutin dengan unit kerja terkait melalui grup chat dan surat resmi, dan 2) koordinasi dengan Itjen. KKP untuk konfirmasi BA PTL.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja dengan eselon I lingkup KKP, sebagai berikut:



Indikator Kinerja 18

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen PSDKP

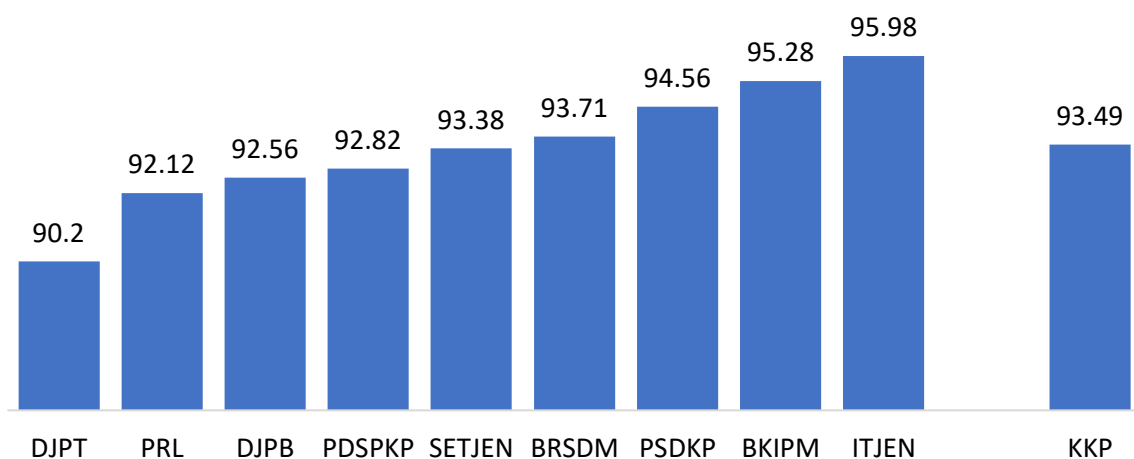
Pengukuran Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran meliputi 4 (empat) aspek yaitu: aspek kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan (3 indikator), kepatuhan terhadap regulasi (4 indikator), efektivitas pelaksanaan kegiatan (4 indikator) dan efisiensi pelaksanaan kegiatan (2 indikator). Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Online Monitoring SPAN (OM SPAN) Kementerian Keuangan. Capaian Nilai Ditjen. PSDKP Tahun 2022 sebesar 94,58 dari target 89 atau persen capaian sebesar 106,27%. Perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target renstra 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.24.
Perbandingan Target dan Capaian IK “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran”

Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2024
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	Target
IK 18. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	88	94,78	107,70	89	92,31	103,63	89	94,58	106,27	80

Ket: T=Target, R=Realisasi

Capaian tahun 2022 meningkat sebesar 2,27% dari capaian tahun 2021, yang menunjukkan semakin meningkatnya pelaksanaan anggaran dan kinerja Ditjen PSDKP. Namun demikian, pada tahun 2022 terdapat beberapa kondisi yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran yaitu adanya blokir mandiri/Automatic Adjustment (AA). Nilai blokir tersebut sangat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Selain itu juga berdampak pada nilai IKPA karena mempengaruhi beberapa indikator pada IKPA yaitu deviasi halaman III DIPA. Apabila dibandingkan dengan eselon I lingkup KKP, capaian Ditjen PSDKP berada diposisi ketiga.



Indikator Kinerja 19

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PSDKP

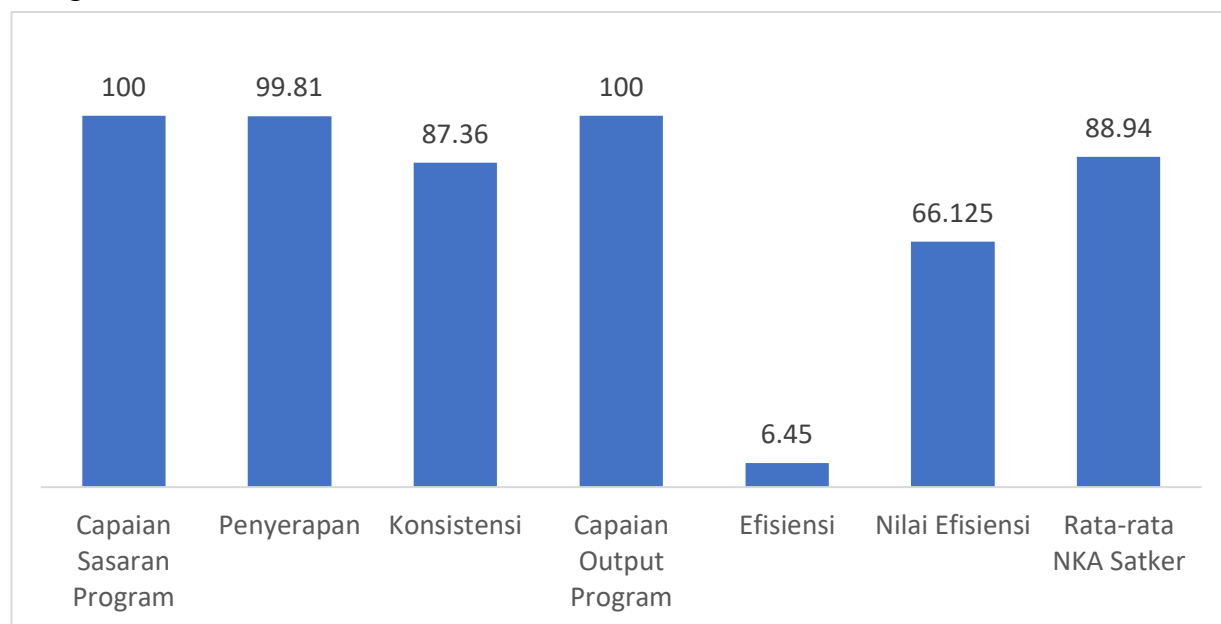
Pengukuran IKU Nilai Kinerja Anggaran (NKA) meliputi beberapa capaian yaitu realisasi anggaran, capaian output, capaian IKU. Penghitungan capaian kinerja diperoleh dari hasil penghitungan yang dilakukan dalam aplikasi Sistem Monitoring Anggaran dan Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan. Capaian Nilai Ditjen. PSDKP Tahun 202 sebesar 92,49 dari target 86 atau 107,55%. Perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dan target 2024, sebagai berikut:

Tabel 3.25.
Perbandingan Target dan Capaian IK “Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PSDKP”

Indikator Kinerja	2020			2021			2022			2024
	T	R	%	T	R	%	T	R	%	Target
IK 19. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PSDKP	89	91,07	102,32	86	89,27	103,873	86	92,47	107,52	89

Ket: T=Target, R=Realisasi

Capaian tahun 2022 meningkat 3,2% dari capaian tahun 2021, yang menunjukkan semakin meningkatnya kinerja anggaran Ditjen PSDKP. Nilai tersebut ditinjau dari beberapa hal sebagai berikut:



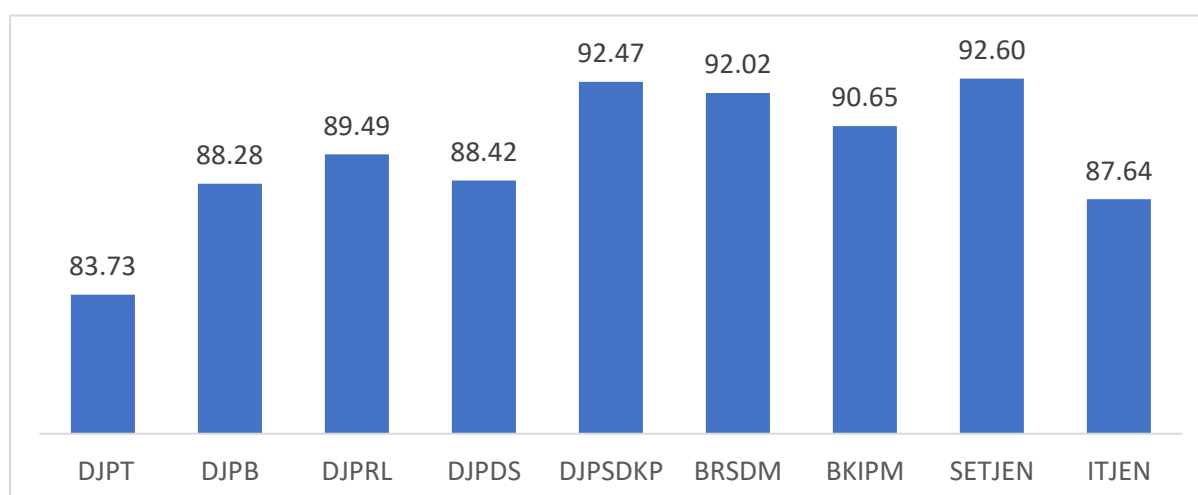
1. Capaian Sasaran Program, dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi capaian kegiatan program dengan target sasaran program;
2. Penyerapan Anggaran, dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker.
3. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan

antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker dari rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan;

4. Capaian Keluaran Program, dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran;
5. Tingkat efisiensi, dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran;
6. Rata-rata satker diperoleh dari nilai kinerja satuan kerja lingkup Ditjen PSDKP terdiri dari 5 satker pusat, 14 satker UPT PSDKP dan 34 Staker Dekonsentrasi.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai kinerja ini antara lain sosialisasi pengisian aplikasi sistem monitoring anggaran dan kinerja terpadu (SMART) dan monitoring secara berkala pengisian aplikasi SMART terhadap seluruh satker lingkup Ditjen PSDKP.

Pabila dibandingkan dengan eselon I Lingkup KKP, Ditjen PSDKP menempati posisi pertama, sebagaimana disajikan pada grafik dibawah.



C. Efisiensi

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya anggaran Ditjen. PSDKP. Penghitungan efisiensi mengacu pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 tahun 2021 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi keluaran anggaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Tahun 2022, efisiensi penggunaan sumber daya khususnya anggaran Ditjen PSDKP mengacu pada aplikasi SMART sebesar 6,45.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola yang efektif dan efisien, telah dilakukan upaya penyederhanaan dan efisiensi atas pemanfaatan sumber daya lingkup Ditjen PSDKP yaitu

Pengembangan *e-office*. Perkembangan teknologi dan informasi terkini mengamanatkan kepada organisasi, civitas organisasi dan individu untuk dapat berkembang lebih baik lagi dan beradaptasi dengan situasi terkini, salah satunya dengan mengalihkan sistem layanan perkantoran dari pakem yang sudah ada menjadi layanan perkantoran berbasis teknologi informasi. Pada tahun 2022 sudah diimplementasikan berupa pengembangan *e-cuti* yang bertujuan untuk mempermudah pengajuan cuti pegawai lingkup Ditjen PSDKP.

D. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran Ditjen. PSDKP TA. 2022 sebesar Rp. 777.246.625.000,-. Anggaran tersebut didistribusikan pada 5 (lima) satker pusat, 14 (empat belas) UPT Pengawasan SDKP dan 34 (tiga puluh empat) satker Dekonsentrasi. Realisasi Anggaran Ditjen. PSDKP sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 775.747.149.360; atau 99,81%. Rincian anggaran dan realisasi untuk mendukung pencapaian sasaran program Ditjen PSDKP Tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 3.26. Anggaran dan Realisasi Berdasarkan Sasaran Program 2022

Sasaran Program	Jumlah Indikator Kinerja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Tatakelola SDKP bertanggung jawab	1	28.018.566.000	27.932.980.828	99,69
Pemantauan dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif	3	484.470.342.000	483.895.970.963	99,88
Tata kelola pemerintahan yang baik	15	264.757.717,000	263.918.197.569	99,68
JUMLAH	19	777.246.625.000	775.747.149.360	99,81

Rincian Realisasi Anggaran berdasarkan Satker Ditjen. PSDKP tahun 2022, sebagai berikut:

NO	SATKER	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	Direktorat POA	275.634.581.000	275.251.639.208	99,86
2	Direktorat PPSDK	8.064.833.000	8.046.687.083	99,77
3	Direktorat PPSDP	7.121.709.000	7.117.806.143	99,95
4	Direktorat PP	5.136.389.000	5.130.168.704	99,88
5	Sekretariat DITJEN. PSDKP	84.911.279.000	84.669.742.798	99,72
6	UPT PSDKP	390.927.377.000	390.187.224.924	99,81
7	Dekonsentrasi	5.450.457.000	5.343.130.500	98,03
TOTAL		777.246.625.000	775.747.149.360	99,81



BAB IV



A. KESIMPULAN

Pelaksanaan rencana kinerja Ditjen PSDKP pada tahun 2022 menghadapi tantangan yang besar dengan munculnya pandemi Covid-19 sejak tahun 2020 yang mengakibatkan perlunya *Automatic Adjustment* anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Disisi lain pengelolaan kelautan dan perikanan termasuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan harus tetap berjalan. Namun dengan kondisi seperti itu, seluruh indikator kinerja yang diperjanjikan mampu dicapai sesuai target, secara total capaian kinerja tahun 2022 sebesar 103,89%. Realisasi anggaran dalam rangka mewujudkan 5 sasaran program dan 19 indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 telah tercapai 99,81%.

B. LANGKAH-LANGKAH PERBAIKAN

Ditjen. PSDKP terus berupaya untuk meningkatkan kinerja yang telah dicapai melalui langkah-langkah perbaikan antara lain:

1. Membangun Sistem pengawasan yang terintegrasi berbasis teknologi untuk mendukung implementasi kebijakan ekonomi biru.
2. Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik mengupayakan digitalisasi layanan kesekretariatan.
3. Penguatan Sistem Manajemen Kinerja perlu terus dilakukan dengan memastikan *interoperabilitas* data dan layanan dari sistem informasi yang digunakan di lingkungan Ditjen PSDKP.
4. Penajaman indikator kinerja baik target maupun cara pengukurannya yang akan dijadikan acuan penyusunan sasaran merupakan prioritas pada sisi perencanaan kinerja;
5. Mendorong konsistensi keterlibatan pimpinan dalam proses perencanaan, monitoring dan Evaluasi kinerja secara berkala disetiap satuan kerja lingkup Ditjen PSDKP, sehingga tujuan Ditjen PSDKP terkomunikasikan dan dipahami serta dapat dilaksanakan.



LAMPIRAN - LAMPIRAN



bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Adin Nurawaluddin**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 16 Desember 2022

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

Adin Nurawaluddin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
PROGRAM 1. PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN			
SP1.1	Tata kelola pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab	1. Persentase Kepatuhan (<i>Compliance</i>) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	96
SP1.2	Pemantauan pemanfaatan SDKP yang efektif	2. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan SDKP (%)	100
SP1.3	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif	3. Jumlah WPP NRI rawan kegiatan kelautan dan perikanan ilegal yang diawasi (WPP NRI)	6
SP1.4	Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif	4. Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan (%)	93
PROGRAM 2. DUKUNGAN MANAJEMEN			
SP2.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	5. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	32
		6. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	80
		7. Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP (indeks)	70
		8. Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (unit)	10
		9. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	77
		10. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	80,01
		11. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)	1
		12. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PSDKP dibandingkan realisasi anggaran Ditjen. PSDKP Tahun 2021 (%)	<1
		13. Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal PSDKP (level)	3
		14. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)	75
		15. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)	75
		16. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)	86

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		17. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)	70
		18. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	89
		19. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	86

Data Anggaran

NO	PROGRAM/SASARAN PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	512.488.908.000
SP1.1	<i>Tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab</i>	
SP1.2	<i>Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif</i>	
2.	Program Dukungan Manajemen	264.757.717.000
SP2.1	<i>Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP</i>	
TOTAL ANGGARAN		777.246.625.000

Jakarta, 16 Desember 2022

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Adin Nurawaluddin**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Adin Nurawaluddin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
PROGRAM 1. PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN			
SP1.1	Tata kelola pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab	1. Persentase Kepatuhan (<i>Compliance</i>) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	96
SP1.2	Pemantauan pemanfaatan SDKP yang efektif	2. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan pemanfaatan SDKP (%)	100
SP1.3	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif	3. Jumlah WPP NRI rawan kegiatan kelautan dan perikanan ilegal yang diawasi (WPP NRI)	6
SP1.4	Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif	4. Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan (%)	93
PROGRAM 2. DUKUNGAN MANAJEMEN			
SP2.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	5. Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	32
		6. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	80
		7. Indeks efektivitas kebijakan pemerintah bidang pengawasan SDKP (indeks)	70
		8. Unit Kerja yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (unit)	10
		9. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (indeks)	77
		10. Nilai PM SAKIP lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	87,25
		11. Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit)	1
		12. Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas Laporan Keuangan Direktorat Jenderal PSDKP dibandingkan realisasi anggaran Ditjen. PSDKP Tahun 2021 (%)	<1
		13. Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal PSDKP (level)	3
		14. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)	75
		15. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)	75
		16. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)	86

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		17. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (%)	70
		18. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	89
		19. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Direktorat Jenderal PSDKP (nilai)	86

Data Anggaran

NO	PROGRAM/SASARAN PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	628.599.712.000
SP1.1	<i>Tata kelola pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab</i>	
SP1.2	<i>Pemantauan pemanfaatan SDKP yang efektif</i>	
SP1.3	<i>Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif</i>	
2.	Program Dukungan Manajemen	275.134.973.000
SP2.1	<i>Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Direktorat Jenderal PSDKP</i>	
TOTAL ANGGARAN		903.734.145.000

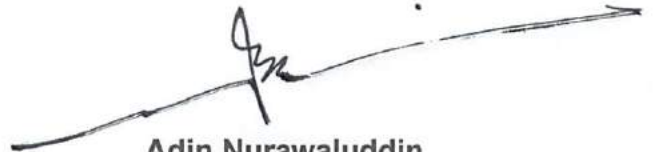
Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Adin Nurawaluddin



**DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**